



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PERANAN AUDIT OPERASIONAL ATAS BPKB SEBAGAI JAMINAN KREDIT DALAM MEMINIMALISASI PIUTANG TAK TERTAGIH PADA ASTRA KREDIT COMPANIES CABANG PADANG

SKRIPSI



**FEBRY YENI ANWAR
07153013**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

**PERANAN AUDIT OPERASIONAL ATAS BPKB SEBAGAI JAMINAN
KREDIT DALAM MEMINIMALISASI PIUTANG TAK TERTAGIH
PADA ASTRA CREDIT COMPANIES CABANG PADANG**

ABSTRACT

This research focused on Collateral principle, that is a credit assurance given by debtor. The function of this assurance is a protection for ACC from risk of loss , such as the occurrence of bad debt. The credit assurance that chosen by ACC as their company protector is BPKB (Buku pemilik Kendaraan Bermotor), because BPKB is a certificate of ownership. ACC always do an operational audit to their debtor's BPKB, to avoid fraud that caused loss. This research used descriptive analysis method. The data collection methods used in this research are Field Research and Library Research. Field Research consists of interview and observation to find out how effective BPKB in minimalizing bad debt in ACC. While Library Research, as theoritical guideline when doing field research and analyzing data. The result of operational audit report comparison from BPKB in ACC on November 1st 2011 and January 2nd 2012 has shown that operational audit for credit assurance has important role in minimalizing bad debt in ACC. This is evident from the power of AR Management in ACC in the withdrawal of vehicle, because the debtor was unable to fulfill their obligation.

Keyword: *Operational Audit, Credit Assurance, Bad Debt.*

**PERANAN AUDIT OPERASIONAL ATAS BPKB SEBAGAI JAMINAN
KREDIT DALAM MEMINIMALISASI PIUTANG TAK TERTAGIH
PADA ASTRA CREDIT COMPANIES CABANG PADANG**

ABSTRAK

Fokus penelitian ini terletak pada prinsip Collateral, yaitu jaminan kredit yang diberikan debitur. Fungsi jaminan ini adalah sebagai pelindung bagi ACC dari resiko kerugian, seperti terjadinya piutang tak tertagih. Jaminan kredit yang dipilih ACC untuk dijadikan pelindung perusahaannya adalah BPKB (Buku pemilik Kendaraan Bermotor), karena BPKB merupakan certificate of ownership. ACC selalu melakukan audit operasional terhadap BPKB debiturnya, agar tidak terjadi kecurangan yang menyebabkan kerugian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Field Research dan Library Research. Field Research terdiri dari wawancara, dan observasi untuk melihat seberapa efektif BPKB dalam meminimalisasi piutang tak tertagih pada ACC. Sedangkan Library Research, sebagai pedoman teoritis pada waktu melakukan penelitian lapangan, serta menganalisis data. Hasil perbandingan laporan audit operasional atas BPKB di ACC tertanggal 1 November 2011 dengan tanggal 2 Januari 2012 telah menunjukkan bahwa audit operasional atas jaminan kredit sangat berperan dalam meminimalisasi piutang tak tertagih di ACC. Hal ini terbukti dari kekuatan AR. Manajemen di ACC dalam penarikan kendaraan, karena debitur tidak mampu bayar kewajibannya.

Keyword: Audit Operasional, Jaminan Kredit, Piutang Tak Tertagih.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil 'alamin, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang sangat besar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan Audit Operasional Atas BPKB Sebagai Jaminan Kredit Dalam Meminimalisasi Piutang Tak Tertagih Pada Astra Credit Companies Cabang Padang”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari kendala dan hambatan. Namun motivasi, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak menjadikan penulis kuat, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, terimakasih dengan setulus hati penulis ucapkan kepada:

1. Orangtua yang sangat istimewa, papa Anwar Yacub dan mama Rosmaida yang tidak pernah bosan mengingatkan penulis untuk bisa menjadi putri terbaik yang bisa membanggakan orangtua. Terimakasih atas cinta, arahan, dan do'a yang selalu mama dan papa berikan setiap waktu untuk penulis. Serta untuk aciku, Elva Susanti Anwar, S. Ap, akhirnya ni sarjana juga kayak aci..hahahaha:D.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafruddin karimi, SE., MA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.

3. Bapak Dr. H. Yuskar SE., MA., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
4. Bapak Firdaus, SE, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing akademik selama penulis dalam masa perkuliahan.
5. Ibu Dra. Nini Syofriyeni, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terimakasih atas ilmu, arahan, serta senyuman tulusnya buk, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Drs. H. Rinaldi Munaf, MM, Ak, CPA selaku dosen penelaah skripsi penulis, yang telah menelaah skripsi penulis dengan sangat baik.
7. Ibu Dra. Hj. Sri Daryanti Zen, MBA, Ak dan ibu Raudhatul Hidayah, SE, M.Si, Ak selaku dosen penguji kompre penulis, terimakasih atas ilmu dan arahnya buk.
8. Bapak dan Ibu dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis. Semoga penulis mampu memanfaatkan ilmu ini dengan sebaik-baiknya, amin.
9. Staff administrasi biro jurusan Akuntansi Da Ari, Mama Loli, Ni Eva dan staff Accounting Reading Room. Terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya selama masa perkuliahan penulis.
10. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMA FEUA). Begitu banyak pelajaran yang penulis dapat selama menjadi bagian dari keluarga ini. Berawal dari keinginan berorganisasi, menambah pergaulan, sampai keinginan untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari keluarga ini.

11. Para Pejabat Wiskul Area, pejabat penghilang stres di masa perkuliahan.
Jangan pernah mencoba untuk mundur menjadi pejabat ini, karena wiskul area telah mengajarkan kita tentang manisnya persahabatan sob.
12. Kawan-kawan sanasib saraso yang ke-22 yang beranggotakan 22 pasang mengajarkan penulis tentang uniknya kebersamaan di tengah kesulitan.
13. Sobat asrama RPX yang selalu menemani penulis dalam suka dan duka selama tahun 1 masa perkuliahan, yang mengajarkan penulis tentang indahnya hidup mandiri.
14. Teman-teman Akuntansi Unand 2007. Masa pengenalan, kuliah, nongkrong n foto bareng sambil ngegosipin orang lewat di tangga gedung B, bikin tugas bareng di kelas, ujian, dug dug dug tunggu hasil ujian,,huft. Pokoknya 07153... angkatan terbaik untuk selamanya.
15. Rekan-rekan jurusan akuntansi angkatan 04,05,06,08,09, dan 010 dan semua pihak yang telah membantu penulis, baik bantuan tenaga maupun pikiran, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kekurangan itu dapat menjadi perbaikan untuk kedepannya. Demikianlah penulisan kata pengantar skripsi ini, semoga tulisan sederhana ini dapat diterima dan bermanfaat bagi para pembacanya.

Padang, April 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KERANGKA TEORITIS	
2.1 Review Penelitian Terdahulu	8
2.2 Auditing.....	10
2.3 Konsep Audit Operasional	17

2.4	Struktur Pengendalian Internal	30
2.5	Perkreditan	37
2.6	Buku Pemilik Kendaraan Bermotor	46
2.7	Konsep Piutang	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
3.1	Objek Penelitian	52
3.2	Metode Penelitian.....	53
3.3	Teknik Pengumpulan Data	53
3.4	Analisis Data	54
BAB IV PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Astra Credit Companies	56
4.2	Internal Control Terhadap Jaminan Kredit Pada ACC.....	64
4.3	Prosedur <i>In-Out</i> BPKB Pada ACC.....	65
4.4	Audit Operasional Atas BPKB Sebagai Jaminan Kredit Pada ACC.....	73
4.5	Peranan Audit Operasional Atas BPKB Sebagai Jaminan Kredit Dalam Meminimalisasi Piutang Tak Tertagih Pada ACC.....	82
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	85
5.2	Keterbatasan Penelitian	87
5.2	Saran.....	87
DAFTAR REFERENSI		xiii

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Logo Astra Credit Company	57
Gambar 2 Kepemilikan Saham Astra Credit Companies.....	59
Gambar 3 Visi, Misi dan Nilai-Nilai ACC.....	63



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel Perbandingan Hasil Laporan Audit Antara 2 Periode.....	82
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran Pertanyaan Wawancara.....	89
------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komposisi penduduk menurut lapangan kerja di Kota Padang terbanyak adalah perdagangan yaitu sebesar 39,11 %, pelayanan jasa sebesar 25,5 % dan pertanian sebesar 10,49 %. Sedangkan yang terkecil adalah pertambangan dan galian sebesar 0,74 %. Dengan struktur mata pencaharian tersebut menunjukkan bahwa Kota Padang telah tumbuh dan berkembang sebagai pusat kota perdagangan dan pelayanan jasa, dimana kecenderungan tersebut akan memberikan implikasi terhadap kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana yang memadai. Namun hal ini sulit untuk diwujudkan, karena faktor ekonomi masyarakat kota Padang yang kurang memadai.

Salah satu kebutuhan masyarakat kota Padang dalam menjalankan bisnisnya, yaitu alat transportasi yang memadai, terutama kendaraan roda empat. Astra Credit Companies (ACC) mampu menjawab kebutuhan masyarakat kota Padang, dengan menawarkan pembiayaan mobil baru maupun bekas untuk semua calon debiturnya. Pembelian mobil dengan cara kredit dipilih oleh sebagian besar masyarakat kota Padang, karena hanya dengan menyiapkan sekitar 10%-30% uang muka sudah dapat memiliki sebuah mobil. Disisi lain, ini merupakan pangsa pasar yang sangat menggiurkan bagi lembaga pembiayaan sebagai kreditur.

Dalam kegiatan pemberian kredit terdapat unsur dasar berupa kepercayaan, dimana lembaga pembiayaan sebagai pemberi kredit harus percaya,

bahwa penerima kredit dapat mengembalikan pinjaman yang menjadi utangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, kreditur harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan dan prospek usaha debitur.

Pemberian kredit dari kreditur kepada debitur dilakukan dengan mengadakan perjanjian. Perjanjian kredit tersebut terdiri dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang antara kreditur dengan debitur dan perjanjian tambahan berupa pemberian jaminan oleh debitur kepada kreditur. Pengikatan jaminan ini merupakan bentuk pengamanan kredit dalam praktek pembiayaan. Mengingat jaminan merupakan salah satu unsur penting dalam pemberian kredit, maka jaminan ini, harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh kreditur. Biasanya, jaminan ini merupakan semua harta benda debitur, baik benda bergerak maupun benda tetap.

Jaminan yang diberikan oleh debitur ini, harus diteliti dan diperiksa kebenarannya, karena jaminan ini merupakan syarat yang penting diperhatikan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila calon debitur termasuk wanprestasi (tidak sanggup membayar utangnya), maka kreditur wajib melakukan peninjauan dan penilaian yang dianggap layak menurut penilaian kreditur terhadap jaminan yang diserahkan oleh debitur tersebut.

Astra credit companies, yang biasa disingkat ACC dengan pengalaman lebih dari 27 tahun dan memiliki fasilitas pembiayaan untuk semua mobil baru maupun bekas. Jaringan ACC tersebar hampir di seluruh kota besar di Indonesia dan saat ini ACC telah mendukung pembiayaan lebih dari 16.000 dealer mobil di

Indonesia. Untuk semua pembiayaan yang dilakukan oleh ACC sebagai kreditur, ACC hanya menggunakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai jaminan.

BPKB merupakan aset yang sangat berharga bagi debitur, dan merupakan jaminan kredit yang sangat penting bagi ACC. Oleh karena itu, ACC melakukan audit operasional terhadap BPKB, untuk meneliti kebenaran dan menjaga keamanan BPKB yang bersangkutan. Selain hal itu, audit operasional terhadap BPKB sebagai jaminan di ACC dilakukan untuk menghindari resiko kredit berupa piutang tak tertagih oleh ACC, dan mengantisipasi kecurangan yang dilakukan debitur.

Kecurangan yang mungkin akan dilakukan oleh debitur ACC tersebut, akan berdampak kepada penagihan piutang yang akan dilakukan oleh ACC pada waktu yang telah ditentukan. Jika BPKB yang dijadikan jaminan pada ACC tidak diaudit secara berkala oleh ACC, maka resiko yang mungkin timbul di masa yang akan datang adalah sulitnya untuk melakukan penagihan piutang pada debitur. Bahkan kemungkinan piutang tak tertagih semakin besar, karena jaminan yang diberikan debitur tidak dapat dijadikan alat untuk menarik kendaraan debitur yang tidak mampu bayar. Dan hal ini akan berdampak pada kelangsungan perusahaan di masa yang akan datang.

Audit operasional merupakan suatu teknik dalam melakukan penilaian secara sistematis terhadap efektifitas suatu fungsi dalam organisasi. Penilaian ini dilakukan untuk memastikan terlaksananya aktivitas organisasi, mengidentifikasi peluang-peluang penyempurnaan dan memberikan rekomendasi tentang tindakan

korektif yang perlu dilakukan, sehingga dapat memperbaiki kinerja sumber daya manusia dan mampu menciptakan tujuan organisasi yang hendak dicapai.

Beberapa penelitian terdahulu telah dibahas mengenai audit operasional pada beberapa perusahaan, yaitu:

- *Ade Irma Suryani (2005). Peranan Audit Operasional Pengelolaan Piutang Dalam Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Departemen Kredit Pada PT. Suka Fajar, Ltd.*
- *Annisa Fitrianti (2006). Manfaat Audit Operasional Dalam Menunjang Efektifitas Pengendalian Internal Penjualan Pada PT. INTI (Persero) Divisi JTS Bandung.*
- *Vonny Astarari (2011). Peranan Audit Operasional dalam Meningkatkan Efektivitas Kegiatan Perkreditan Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang.*

Penelitian-penelitian diatas menyatakan bahwa audit operasional perlu dilakukan secara rutin, karena jika tidak dilakukan maka perusahaan akan sulit mengetahui hambatan dan kelemahan yang terjadi pada organisasinya. Dari waktu ke waktu perlu adanya evaluasi berupa audit operasional ini untuk menilai apakah setiap kegiatan dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PERANAN AUDIT OPERASIONAL ATAS BPKB SEBAGAI JAMINAN KREDIT DALAM MEMINIMALISASI PIUTANG TAK TERTAGIH (STUDI KASUS PADA ASTRA CREDIT COMPANIES CABANG PADANG)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dilihat rumusan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana prosedur *In-Out* BPKB sebagai jaminan kredit yang ditetapkan Astra Kredit Companies?
2. Bagaimana pelaksanaan audit operasional atas BPKB sebagai jaminan kredit pada Astra Credit Companies?
3. Bagaimana peranan audit operasional atas BPKB sebagai jaminan kredit dalam meminimalisasi piutang tak tertagih pada Astra Credit Companies?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur *In-Out* BPKB sebagai jaminan kredit yang ditetapkan Astra Credit Companies.
2. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan audit operasional atas BPKB sebagai jaminan kredit pada Astra Credit Companies.
3. Untuk mengetahui peranan audit operasional atas BPKB sebagai jaminan kredit dalam meminimalisasi piutang tak tertagih pada Astra Credit Companies.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi perusahaan yang diteliti, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi perbaikan dan pengembangan dalam pengamanan BPKB, agar dapat meminimalisasi resiko kredit seperti, mengatasi terjadinya piutang tak tertagih.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam menambah pengetahuan terapan sebagai bahan referensi.
3. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan terapan dan pengalaman dalam praktek audit operasional, di samping pengetahuan teoritis yang didapat selama masa perkuliahan, serta untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagai berikut :

1) Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

2) Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang survei literatur mengenai teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, telaah penelitian-penelitian terdahulu.

3) Bab III Metodologi Penelitian

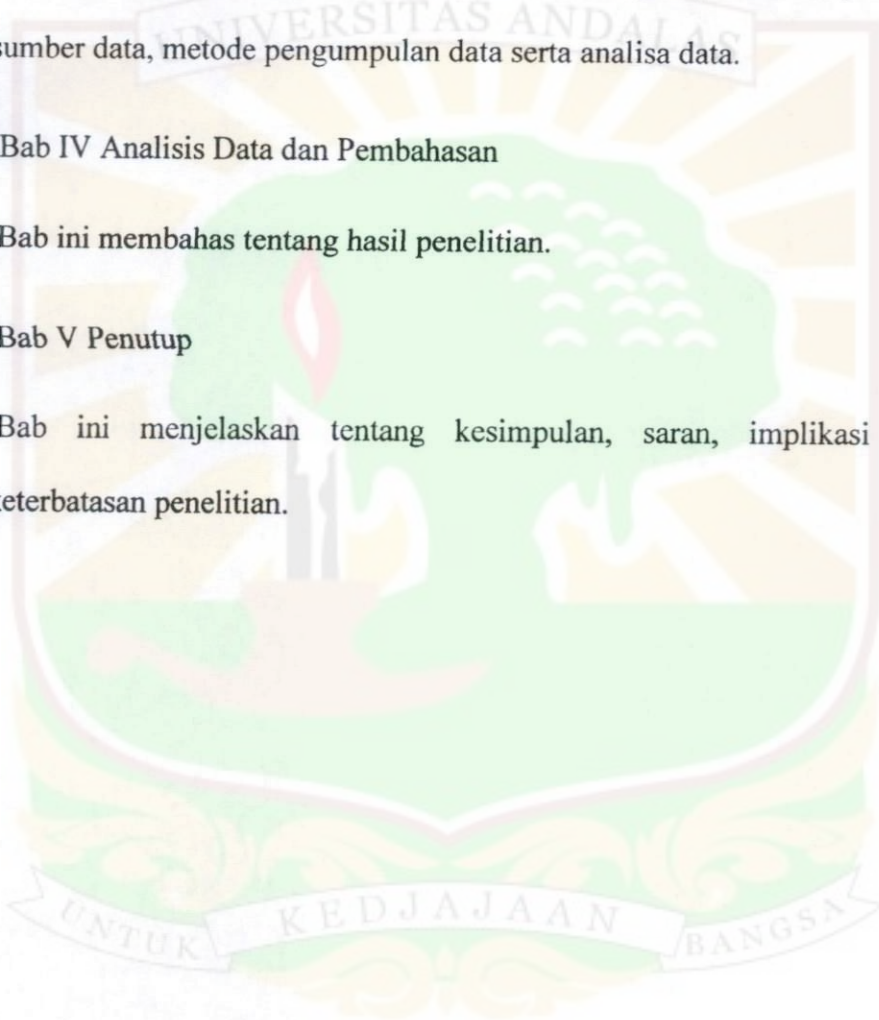
Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta analisa data.

4) Bab IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang hasil penelitian.

5) Bab V Penutup

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, saran, implikasi serta keterbatasan penelitian.



BAB II

KERANGKA TEORITIS

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang audit operasional sebagai bahan utama dalam penulisan telah banyak dilakukan sebelumnya. BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan lain sebagainya telah dijadikan objek penelitian tentang audit operasional oleh peneliti.

Penelitian tentang audit operasional telah dilakukan oleh Ade Irma Suryani (2005) tentang pengelolaan piutang usaha dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi fungsi departemen kredit. Penelitian dilakukan pada PT. Suka Fajar Ltd Padang. Dalam penelitian disimpulkan bahwa audit operasional telah dilakukan sebagai suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi perusahaan termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasionalnya yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Penelitian selanjutnya pada tahun 2006 yang dilakukan oleh Annisa Fitrianti, tentang manfaat audit operasional dalam menunjang efektifitas pengendalian internal penjualan. Objek penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah PT. INTI (Persero) Divisi JTS Bandung. Dari penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan audit operasional pada PT. INTI telah memadai, karena;

- a. Internal auditor yang melaksanakan audit operasional independen dan kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

- b. Pelaksanaan audit operasional terhadap pengendalian internal penjualan didasarkan pada program pemeriksaan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- c. Adanya staf internal auditor yang mempunyai latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang sesuai dengan bidangnya.

Penelitian tentang audit operasional juga dilakukan oleh Vonny Astasari (2011) mengenai peranan audit operasional dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan pada Bank Nagari Cabang Utama Padang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi *descriptive case study*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Audit operasional cukup berperan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan Bank Nagari Cabang Utama Padang, dimana telah terjadi peningkatan kualitas kredit pada tahun 2010.

Penelitian yang telah dijelaskan diatas dapat memberikan gambaran bagi penulis mengenai bagaimana tujuan dan fungsi audit operasional pada perusahaan. Selain itu juga memberikan pengetahuan bagi penulis mengenai metode yang akan digunakan, sehingga disini diharapkan penulis dapat menganalisis masalah yang dihadapi oleh perusahaan dengan lebih tajam dan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi perusahaan untuk mencapai kegiatan operasi yang lebih efektif dan efisien di masa depan.



2.2 Auditing

2.2.1 Pengertian Auditing

Pada prinsipnya audit merupakan kegiatan yang membandingkan kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kondisi yang dimaksud disini merupakan keadaan yang sebenarnya dan sekaligus merupakan informasi yang dapat diverifikasi. Adapun yang dimaksud dengan kriteria adalah keadaan yang seharusnya dapat digunakan oleh auditor sebagai pedoman untuk mengevaluasi informasi.

Sukrisno Agoes (2004), menjelaskan bahwa auditing merupakan suatu proses yang sistematis, dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi keuangan dengan tujuan untuk menentukan dan melaporkan apakah informasi-informasi tersebut telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan serta kemudian melaporkan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sukrisno Agoes juga menyebutkan bahwa audit dilakukan secara kritis, artinya seorang auditor haruslah mempunyai sikap yang tidak lekas percaya, bersikap selalu berusaha menemukan kesalahan serta tajam dalam penganalisaan.

Sedangkan menurut Mulyadi (2002:9), auditing dapat diartikan sebagai suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan

tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Berdasarkan definisi auditing diatas, maka secara umum auditing memiliki unsur-unsur penting, yaitu :

1. Suatu proses sistematis
2. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif
3. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi
4. Menetapkan tingkat kesesuaian
5. Kriteria yang telah ditetapkan
6. Penyampaian hasil
7. Pemakai yang berkepentingan

2.2.2 Tipe Audit

Audit dapat dibagi menjadi beberapa tipe. Pembagian ini dimaksudkan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan diadakannya suatu kegiatan audit tersebut.

Arens dan Mark S.Beasley (2003) menyatakan ada tiga tipe audit :

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit ini mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan

kriteria yang telah ditetapkan, yaitu PABU. Dimana audit ini dilakukan oleh auditor eksternal maupun auditor internal. Laporan hasil audit diberikan kepada manajemen dari entitas yang bersangkutan.

2. Audit operasional (*Operational Audit*)

Audit ini meliputi penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai kegiatan operasional organisasi dalam hubungannya dengan tujuan pencapaian efisiensi, efektivitas maupun kehematan atau disebut juga audit kinerja. Dilakukan oleh auditor eksternal dan laporan hasil audit diberikan kepada pihak ketiga (investor dan kreditor)

3. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit ini penghimpunan dan pengevaluasian bukti dengan tujuan untuk menentukan apakah kegiatan finansial maupun operasi tertentu dari suatu entitas sesuai dengan kondisi-kondisi, aturan-aturan dan regulasi yang telah ditentukan. Kriteria yang telah ditentukan itu berasal dari berbagai sumber seperti manajemen, kreditor, ataupun lembaga pemerintah. Audit ini dapat dilakukan oleh auditor eksternal maupun auditor internal sedangkan laporan hasil audit diberikan kepada manajemen entitas yang bersangkutan dan pemerintah.

Dari pembagian audit diatas dapat dilihat bahwa audit dibagi dengan maksud menentukan tujuan dilakukannya audit, siapa yang melaksanakan audit tersebut, serta kepada siapa laporan audit ini diberikan.

Sedangkan berdasarkan kelompok atau pelaksana audit, dalam artikel BEI (2006:42) audit dapat dibagi menjadi :

1. Audit Ekstern/ independen

Auditor independen bekerja untuk kantor akuntan publik yang statusnya di luar struktur perusahaan yang mereka audit. Umumnya auditor ekstern menghasilkan laporan atas *financial audit*.

2. Auditor Intern

Auditor intern bekerja untuk perusahaan yang mereka audit. Laporan audit manajemen umumnya berguna bagi manajemen perusahaan yang diaudit. Oleh karena itu, tugas auditor internal adalah audit manajemen yang termasuk jenis *compliance audit*.

3. Auditor Pajak

Auditor pajak bertugas memeriksa ketaatan wajib pajak yang diaudit terhadap undang-undang yang berlaku.

4. Auditor Pemerintah

Tugas auditor pemerintah adalah memeriksa kewajaran informasi keuangan yang disusun oleh instansi pemerintahan. Disamping itu, audit juga dilakukan untuk menilai efisiensi dan efektivitas serta ekonomisasi operasi program dan penggunaan barang milik pemerintah. Audit ini dapat dilakukan oleh Badan pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pengelompokan jenis audit ini untuk menentukan sasaran audit yang akan dilaksanakan pada tiap-tiap organisasi oleh auditor. Sehingga

hasil pengauditan akan memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan.

2.2.3 Program Audit

Program audit merupakan rencana yang sistematis untuk melakukan audit serta informasi yang tersedia tentang objek audit. Hal ini diharapkan auditor dapat menentukan langkah apa saja yang harus dilakukan sehingga dapat memberikan dampak yang positif pada audit yang dilakukan untuk lebih terstruktur dan terorganisir.

Menurut Hiro Tugiman (1997;53) dalam bukunya Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dapat dijelaskan secara garis besar mengenai langkah-langkah audit adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan audit, meliputi :
 - a) Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan.
 - b) Memperoleh informasi mengenai kegiatan yang akan diaudit.
 - c) Penentuan staf yang diperlukan untuk pelaksanaan audit.
 - d) Pemberitahuan kepada pihak yang dianggap perlu.
 - e) Melaksanakan survei secara tepat untuk mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko dan pengawasan, sasaran dari pihak yang akan diaudit.
 - f) Penulisan program audit.

2. Pengujian dan pengevaluasian hasil.

Auditor harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit.

3. Pemberitahuan hasil.

Auditor harus melaporkan hasil audit yang dilakukannya setelah pelaksanaan audit selesai. Laporan ini harus objektif, jelas, singkat, komunikatif dan tepat waktu.

4. Tindak lanjut.

Auditor harus terus meninjau dan melakukan tindak lanjut untuk memastikan terhadap temuan audit yang telah dilaporkan, apakah telah dilakukan tindakan yang tepat. Program audit pada umumnya harus dapat memberikan informasi mengenai tujuan audit, ruang lingkup, latar belakang, sasaran audit, dan prosedur audit.

Menurut SPAI (2004), program audit merupakan program kerja yang harus menekankan prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi. Selama penugasan program kerja ini harus memperoleh persetujuan sebelum dilaksanakan perubahan atau penyesuaian. Program ini merupakan penjelasan secara terperinci yang berisi daftar dari prosedur audit, biasanya juga menyatakan ukuran sampel, item-item yang dipilih dan saat pelaksanaan setiap program audit umumnya mengandung dua unsur pokok yaitu:

1. Pernyataan tentang tujuan yang akan dicapai dan cara pendekatan audit yang dipilih.
2. Langkah-langkah kerja atau prosedur audit meliputi persiapan audit, audit pendahuluan, dan audit lanjutan.

Program yang baik terdapat hal-hal berikut :

1. Tujuan audit dinyatakan secara jelas dan harus dicapai atas pekerjaan yang direncanakan.
2. Disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan.
3. Langkah-langkah yang terperinci mengenai pekerjaan yang harus dilakukan.
4. Menggambarkan urutan prioritas langkah kerja yang dilakukan dan bersifat *fleksible*, tetapi setiap perubahan yang ada harus diketahui oleh auditor.
5. Berisi informasi yang diperlakukan untuk melaksanakan evaluasi secara tepat.

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa untuk memulai sebuah audit, perlu dilakukan rencana yang tertuang dalam sebuah program yang terperinci, dan terstruktur sehingga dapat menentukan arah yang baik dalam pelaksanaan audit. Dimana program audit ini diharapkan menjadi jembatan antara pelaksana audit dengan pihak yang diaudit agar pelaksanaan audit bisa melaksanakan audit dengan baik serta pihak yang diaudit mengerti dan memahami perlunya

pelaksanaan audit dan dapat bekerjasama dengan pelaksana audit dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.

2.3 Konsep Audit Operasional

Semakin berkembangnya suatu badan usaha maka semakin besar pula kebutuhan akan pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial yang baik dan efektif agar tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai. Oleh karena itu diperlukan alat untuk mencapai tujuan perusahaan, salah satu alatnya adalah audit operasional.

2.3.1 Pengertian Audit Operasional

Audit operasional banyak juga disebut sebagai pemeriksaan manajemen, pemeriksaan prestasi, pemeriksaan sistem, pemeriksaan efisiensi, dan sebagainya. Karena belum ada pengertian yang tuntas mengenai audit operasional, maka banyak para ahli yang mengemukakan pengertian audit operasional, sebagai berikut:

Definisi audit operasional menurut Phyr, yang dialihbahasakan oleh Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya yang berjudul “Audit Manajemen Kontemporer” (2001:12) adalah suatu penelaahan dan penilaian dari efisiensi dan efektifitas serta prosedur operasi. Pemeriksaan operasional memberi perhatian dan menemukan masalah operasi serta memberitahukannya pada manajemen puncak. Akan tetapi yang utama sebenarnya menyelesaikan masalah dan memberi rekomendasi tindakan yang realistis pada manajemen.

Sedangkan menurut Arens et al (2008:17), audit operasional adalah mengevaluasi efektivitas dan efisiensi setiap prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Dalam audit operasional, review atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas dalam akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi computer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain dimana auditor menguasainya.

Selanjutnya Boynton (2003) memberikan pengertian audit operasional sebagai suatu proses sistematis yang mengevaluasi efektivitas, efisiensi dan kehematan operasi organisasi yang berada dalam pengendalian manajemen serta melaporkan kepada orang-orang yang tepat hasil-hasil evaluasi tersebut beserta rekomendasi perbaikan.

- a) Proses yang sistematis. Seperti dalam audit laporan keuangan, audit operasional menyangkut serangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur dan terorganisasi.
- b) Mengevaluasi operasi organisasi. Evaluasi atas operasi ini harus didasarkan pada beberapa kriteria yang ditetapkan dan disepakati.
- c) Efektivitas, efisiensi, dan kehematan operasi. Tujuan utama dari audit operasional adalah membantu manajemen organisasi yang diaudit untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kehematan operasi.
- d) Melaporkan kepada orang-orang yang tepat. Penerima laporan audit operasional yang tepat adalah manajemen atau individu atau badan yang meminta audit.

- e) Rekomendasi perbaikan. Tidak seperti audit laporan keuangan, audit laporan keuangan tidak berakhir dengan menyajikan laporan mengenai temuan. Pengembangan rekomendasi sebenarnya merupakan salah satu aspek yang paling menantang dalam jenis audit ini.

Dari definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa audit operasional adalah:

1. Proses penilaian secara teratur dan sistematis atas aktivitas, metode-metode dan prosedur pengelolaan organisasi
2. Mengevaluasi efisiensi serta efektifitas atau prosedur pengelolaan yang dijalankan organisasi
3. Bertujuan untuk membantu manajemen dalam memecahkan masalah dengan merekomendasikan tindakan korektif yang diperlukan.

Dari definisi diatas jelas bahwa audit operasional selalu berkaitan dengan efisiensi dan efektifitas. Efisiensi mengacu pada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan, sedangkan efektifitas mengacu pada pencapaian suatu tujuan.

2.3.2 Jenis-jenis Audit Operasional

Menurut Arens & Loebbecke (2000;299) audit operasional dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu:

1. Functional Audit, yaitu audit operasional terhadap salah satu atau beberapa fungsi dalam organisasi. Keuntungan dari audit operasional adalah seorang

auditor dapat mengembangkan keahliannya dan menggunakan seluruh waktunya khusus untuk mengaudit fungsi tersebut.

2. Organizational Audit, yaitu audit operasional yang dilakukan atas seluruh unit organisasi. Audit ini menekankan pada seberapa jauh fungsi dalam organisasi saling berinteraksi dengan efisien dan efektif.
3. Special Assignment, yaitu audit yang dilakukan atas dasar permintaan manajemen, seperti menentukan penyebab terjadinya kecurangan dalam suatu divisi dan mengajukan rekomendasi untuk mengurangi biaya produksi suatu produk.

2.3.3 Pelaksanaan Audit Operasional

Pelaksanaan audit operasional biasanya dilakukan oleh auditor internal dimana seorang auditor ini harus bersikap:

a. Independensi

Menurut Hiro Tugiman (2002:20) independensi adalah jika auditor internal dianggap mandiri apabila melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif.

Independensi dapat diperoleh melalui 2 hal, yaitu:

- a) Status Organisasi, suatu organisasi unit pemeriksaan haruslah memberikan keleluasaan untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggungjawab pemeriksaan yang diberikan.
- b) Objektivitas, yaitu sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh auditor operasional dalam melaksanakan tugas audit.

b. Kompetensi

Seorang auditor harus memiliki pengetahuan yang cukup agar dapat memahami kriteria yang digunakan dan memiliki kemampuan untuk dapat mengetahui dengan pasti jenis dan jumlah fakta yang dibutuhkan, agar pada akhirnya pemeriksaan dapat menarik kesimpulan yang tepat.

2.3.4 Tujuan Audit Operasional

Tujuan audit operasional menurut Amin Widjaja Tunggal (2001:12) adalah

- a) Objek dari audit operasional adalah mengungkapkan kekurangan dan ketidakberesan dalam setiap unsur yang diuji oleh auditor operasional dan untuk menunjukan perbaikan apa yang dimungkinkan untuk memperoleh hasil yang terbaik dari operasi yang bersangkutan.
- b) Untuk membantu manajemen dalam mencapai administrasi operasi perusahaan yang paling efisien.
- c) Untuk mengusulkan kepada manajemen cara-cara dan alat-alat untuk mencapai tujuan apabila manajemen operasi sendiri kurang pengetahuan tentang pengelolaan yang efisien.
- d) Audit operasional bertujuan untuk mencapai efisiensi dalam pengelolaan
- e) Untuk membantu manajemen, auditor operasional berhubungan dengan fase dari aktivitas usaha yang dapat menjadi dasar pelayanan pada manajemen
- f) Untuk membantu manajemen pada setiap tingkat dalam pelaksanaan yang efektif dan efisien dari tujuan dan tanggungjawab mereka.

2.3.5 Manfaat Audit Operasional

Menurut Amin Widjaya Tunggal (2001;24) manfaat yang diperoleh dari adanya audit operasional adalah sebagai berikut:

- a) Kemampulabaan yang meningkat
- b) Alokasi sumber daya yang lebih efisien
- c) Identifikasi masalah pada tahap awal
- d) Komunikasi yang lebih baik

Pada hakikatnya audit operasional memberikan kesempatan untuk memberikan bantuan aktif dalam pengurusan eksekutif perusahaan dengan menimbulkan pengaruh yang hasilnya langsung dapat diukur.

2.3.6 Keterbatasan Audit Operasional

Adapun keterbatasan audit operasional adalah:

- a) Waktu, merupakan faktor yang sangat membatasi audit operasional untuk mencapai tujuan dan manfaat audit operasional karena pemeriksa harus memberikan informasi kepada manajemen dengan segera untuk memecahkan masalah yang dihadapi
- b) Keahlian yang Diperlukan, Audit operasional sangat luas sehingga pengetahuan yang dimiliki oleh pemeriksa merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan audit operasional, sedangkan pengetahuan atau keahlian yang dimiliki oleh pemeriksa terbatas, karena seorang pemeriksa tidak mungkin menguasai atau ahli dalam semua bidang

- c) Biaya, pemeriksa operasional harus selalu ingat bahwa biaya juga merupakan salah satu faktor keterbatasan dalam melaksanakan audit. Oleh karena itu, pemeriksa operasional harus dapat menghemat biaya pemeriksaannya.

2.3.7 Pelaksana Audit Operasional

Menurut Arens & Loebbecke (2000;800-802) audit operasional biasanya dilakukan oleh salah satu dari 3 kelompok di bawah ini:

- a) Internal Auditor, orang internal perusahaan yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan audit internal di dalam perusahaan itu sendiri. Auditor internal dapat mengembangkan pengetahuan tentang perusahaan dan segala permasalahan yang ada dalam perusahaan untuk menjadikan audit operasional efektif.
- b) Government Auditor, salah satu badan pemerintahan yang bertugas untuk melakukan audit operasional, seringkali merupakan bagian dari pelaksanaan audit keuangan.
- c) CPA Firm, pada bagian audit ini biasanya terdiri dari pengidentifikasian masalah-masalah operasional dan membuat rekomendasi yang dapat bermanfaat dari klien yang diperiksa.

2.3.8 Kriteria Audit Operasional

Arens & Loebbecke (2003:743) menyebutkan beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam audit operasional, yaitu:

- a) Historical Performance (prestasi kerja masa lalu/sebelumnya), sekelompok kriteria yang didasarkan pada hasil aktual dari periode sebelumnya (hasil audit).
- b) Benchmarking (prestasi yang dapat diperbandingkan), kriteria yang dapat ditetapkan berdasarkan hasil yang dicapai oleh entitas yang sama dalam organisasi secara keseluruhan atau dari entitas di luar organisasi perusahaan.
- c) Engineered Standard (Standar rekayasa/ standar teknis), untuk mengembangkan kriteria ini seringkali menghabiskan waktu dan biaya karena memerlukan biaya yang khusus. Namun, kriteria ini efektif untuk memecahkan masalah operasional yang penting dan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
- d) Discussion and Agreement (Diskusi dan persetujuan), kriteria yang dikembangkan melalui suatu diskusi yang sederhana dan merupakan persetujuan bersama. Pihak yang terlibat dalam proses ini adalah manajemen, pemeriksa operasional, dan pihak lain yang akan menerima laporan hasil pemeriksaan.

2.3.9 Ruang Lingkup Pelaksanaan Audit Operasional

Menurut Amin Widjaya Tunggal (2001:9) yaitu;

- a) Audit operasional adalah prosedur yang bersifat investigatif.
- b) Mencakup semua aspek perusahaan, unit, dan fungsi.
- c) Yang diaudit adalah seluruh perusahaan, atau salah satu unitnya, atau suatu fungsi atau salah satu sub klasifikasinya.
- d) Penelitian dipusatkan pada prestasi dan keefektifan dari perusahaan atau unit atau fungsi yang diaudit dalam menjalankan misi, tanggungjawab, atau tugasnya.
- e) Pengukuran terhadap keefektifan didasarkan pada bukti/data/standar.
- f) Tujuan utama audit operasional adalah memberikan informasi pada pimpinan tentang efektif tidaknya perusahaan, suatu unit atau fungsi.

2.3.10 Pendekatan Dalam Audit Operasional

Ada tiga pendekatan yang dilakukan dalam melakukan audit operasional menurut Arens dan Loebbecke (2003;799) :

1. Audit Fungsional (*Functional Audit*)

Fungsi merupakan suatu alat penggolongan kegiatan suatu perusahaan, seperti fungsi penerimaan kas atau fungsi produksi. Seperti yang tersirat dalam namanya, audit fungsional berkaitan dengan sebuah fungsi atau lebih dalam suatu organisasi. Keunggulan audit fungsional adalah memungkinkan adanya spesialisasi oleh auditor. Auditor dapat lebih efisien memakai seluruh waktu mereka untuk memeriksa dalam bidang itu.

Kekurangan audit fungsional adalah tidak dapat dievaluasinya fungsi yang saling berkaitan di dalam organisasi.

2. Audit Organisasi (*Organizational Audit*)

Audit operasional atas suatu organisasi menyangkut keseluruhan unit organisasi, seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan. Penekanan dalam suatu audit organisasi adalah seberapa efisien dan efektif fungsi-fungsi yang saling berinteraksi.

3. Penugasan Khusus (*Special Assignment*)

Penugasan audit operasional khusus timbul atas permintaan manajemen. Ada banyak variasi dalam audit seperti itu. Contohnya mencakup penentuan penyebab tidak efektifnya sistem, penyelidikan kemungkinan kecurangan dalam suatu divisi, dan membuat rekomendasi untuk mengurangi biaya produksi suatu barang.

2.3.11 Sumber Data Audit Operasional

Sumber data bagi pemeriksa operasional dapat meliputi pengamatan sekilas atas fasilitas fisik, wawancara dengan pejabat fungsional dengan menggunakan kuisioner pengendalian manajemen, pengendalian operasi dan hasil analisa keuangan. Analisa keuangan memegang peranan penting dalam pekerjaan pemeriksaan operasional. Berbagai rasio keuangan perusahaan selama tahun berjalan, untuk tahun-tahun yang lalu dan untuk industri secara keseluruhan dapat dijadikan sarana yang bermanfaat untuk membantu pemeriksa mengetahui perkembangan efisiensi atau pola penurunan efisiensi .setelah pemeriksaan

pendahuluan diselesaikan, pemeriksa perlu menyusun suatu laporan pemeriksaan (sering disebut memorandum survei) yang digunakan untuk keperluan sendiri.

Setelah pemeriksaan pendahuluan dan memorandum diselesaikan, pemeriksa dapat menentukan pilihan bagian mana yang perlu diperiksa lebih mendalam. Dalam hal ini ada tiga sumber informasi yang dapat digunakan oleh pemeriksa dalam pemeriksaan mendalam yaitu :

1. Pada karyawan
2. Dokumen-dokumen intern
3. Observasi langsung.

Karyawan yang bekerja pada bagian yang diperiksa merupakan sumber informasi utama. Di sini diperlukan teknik wawancara dan susunan quisioner yang baik. Dokumen intern dari suatu bagian yang harus diperoleh pemeriksa operasional meliputi petunjuk prosedur, bagan organisasi, brosur penerimaan pegawai, periklanan, laporan keuangan, anggaran dan analisa *variance*. Observasi langsung bermanfaat untuk mengungkap berbagai masalah yang tidak efisien dan tidak efektif serta berbagai masalah lain yang dirahasiakan oleh karyawan atau yang memang tidak mereka ketahui. Setelah pemeriksaan mendalam selesai, pemeriksa dapat melanjutkan dengan wawancara yang melibatkan personel yang bersangkutan.

Hasil akhir audit operasional adalah laporan formal tertulis kepada manajemen perusahaan. Laporan harus merinci berbagai masalah yang ditemui

selama melakukan audit. Tujuannya untuk memberi saran pada manajemen mengenai upaya yang dilakukan agar manajemen lebih efisien dan efektif.

2.3.12 Perbedaan Audit Keuangan dengan Audit Operasional

Perlu dipahami perbedaan antara audit operasional dengan audit keuangan. Hal ini berguna dalam melakukan penelitian sehingga tidak ada keraguan mengenai kegiatan audit yang akan dilakukan. Audit keuangan bertujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran pelaporan keuangan dan menekankan pada terselenggaranya pengendalian internal perusahaan dan hasil audit keuangan sering dilaporkan pada pihak luar perusahaan seperti pemegang saham, masyarakat serta manajemen. Sedangkan audit operasional bertujuan untuk mengetahui kegiatan, mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbaikan atau peningkatan dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kegiatan yang sedang berjalan dan hasil audit operasional biasanya dilaporkan pada pihak manajemen perusahaan.

2.3.13 Tahapan Audit Operasional

Menurut Rob Reider (2003;38-39) menguraikan audit operasional dalam lima tahapan, yaitu;

- a) Tahapan Pendahuluan, memungkinkan terselenggaranya perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan audit secara teratur.

Informasi umum tentang perusahaan yang diperiksa dapat diperoleh melalui;

- Penghematan atas fasilitas fisik

- Mencari data tertulis
 - Wawancara dengan personil manajemen
 - Analisis keuangan
- b) Program Kerja, auditor perlu menyiapkan program kerja untuk mendahului kegiatan audit supaya kegiatan audit menjadi sistematis dan terarah.
- c) Tahap Audit Mendalam
- Menurut Arens & Loebbecke (2003;804-805) membagi tahap audit mendalam menjadi tiga tahapan, yaitu:
- Perencanaan
 - Pengumpulan dan evaluasi bahan bukti
 - Pelaporan dan tindak lanjut
- d) Temuan dan Rekomendasi, perbaikan kelemahan dan kekurangan dikomunikasikan pada pimpinan perusahaan sehingga dapat diterapkan dalam perusahaan
- e) Tahap Laporan Audit, harus mencerminkan ketepatan penerapan prosedur dalam semua tahap audit dan harus didukung oleh bukti dokumenter yang dicatat dalam kertas kerja. Laporan audit operasional pada umumnya meliputi unsur-unsur sebagai berikut:
- Tujuan dan ruang lingkup penugasan
 - Prosedur yang digunakan
 - Temuan-temuan khusus
 - Rekomendasi jika diperlukan

2.4 Struktur Pengendalian Internal (SPI)

Pengendalian internal terdiri dari rencana organisasi serta seluruh metode koordinasi dan pengukuran yang diterapkan oleh perusahaan untuk menjaga asetnya, menguji keakuratan dan keandalan data akuntansinya, mendukung efisiensi dan efektivitas operasional serta mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Definisi dari AICPA tersebut menjelaskan pengertian pengendalian internal sebagai suatu kerangka kerja tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Kerangka kerja tersebut terdiri dari rencana organisasi serta metode dan alat-alat pengukuran lainnya yang digunakan oleh organisasi untuk:

1. Menjaga aktiva organisasi yang bersangkutan.
2. Menguji keakuratan dan keandalan data akuntansinya.
3. Mendukung efisiensi dan efektivitas operasional.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan manajerial yang telah ditetapkan.

Dari rencana organisasi, metode dan alat-alat pengukuran lainnya tersebut, pengendalian intern yang utama meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya pemisahan tugas dan uraian tugas yang memadai.
2. Adanya dokumentasi dan catatan yang memadai.
3. Adanya otorisasi yang memadai dari manajemen.
4. Adanya pengendalian yang memadai atas aktiva dan catatan.
5. Adanya penilaian yang independen terhadap kinerja para pegawai.
6. Adanya pegawai yang kompeten.

7. Adanya struktur organisasi yang baik dengan garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas.
8. Adanya pengelolaan (manajemen) yang baik dengan tingkat integritas yang tinggi.

Jadi, struktur pengendalian internal merupakan seluruh kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk memperoleh kepastian bahwa tujuan organisasi yang telah ditetapkan oleh manajemen tersebut akan tercapai.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, 2001 (dalam Budi Satria, 2009:42) terdapat komponen dalam pengendalian internal, yaitu:

1. *Lingkungan Pengendalian*

Menunjukkan pengaruh gabungan dari beberapa faktor dalam menentukan, memperkuat atau memperlemah efektivitas kebijakan dan prosedur-prosedur tertentu sebagai gambaran dari sikap, kepedulian dan tindakan-tindakan dari dewan komisaris, manajemen, pemilik, pegawai dan pihak lain mengenai pentingnya pengendalian. Lingkungan pengendalian ini dapat meliputi adanya nilai-nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, dewan komisaris dan komite audit, filosofi manajemen dan gaya operasional manajemen, struktur organisasi, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, serta kebijakan dan praktek SDM.

2. *Sistem Akuntansi*

Sistem akuntansi mencakup seluruh metode dan pencatatan yang dibuat oleh manajemen untuk mengidentifikasi, menghimpun, menganalisis, mengelompokkan, mencatat dan melaporkan transaksi satuan usaha serta untuk menyelenggarakan pertanggungjawaban aktiva dan kewajiban yang bersangkutan dengan transaksi tersebut. Salah satu manfaat terbesar dari adanya sistem akuntansi adalah bahwa apabila terdapat sistem akuntansi yang memadai maka manajemen sewaktu-waktu dapat menjelaskan transaksi yang terjadi di dalam organisasinya secara cukup rinci, dapat menetapkan waktu yang sesuai dengan periode akunansinya (*cut-off*), serta dapat membuat laporan keuangan kapan saja laporan tersebut dibutuhkan.

3. *Prosedur Pengendalian*

Prosedur pengendalian meliputi kebijakan-kebijakan dan prosedur tambahan atas lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi yang dibuat oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan organisasi yang bersangkutan akan dapat dicapai. Pada umumnya prosedur pengendalian ini dapat berbentuk apa saja karena merupakan prosedur tambahan, akan tetapi biasanya prosedur-prosedur tersebut berkaitan dengan salah satu dari lima kategori antara lain :

1. bahwa semua transaksi harus ada otorisasinya secara memadai,
2. adanya pemisahan tugas yang dapat mengurangi kemungkinan bagi seseorang untuk dapat melakukan kekeliruan/kesalahan dan sekaligus menutupi kekeliruan dan atau ketidakberesan

pelaksanaan tugasnya sehari-hari yang digambarkan oleh struktur organisasi,

3. bahwa dokumen dan catatan yang memadai sudah digunakan untuk menginformasikan mengenai transaksi dan peristiwa yang terjadi di dalam organisasi,
4. bahwa akses dan penggunaan aktiva perusahaan dan catatan harus dikendalikan sedemikian rupa, termasuk akses ke dalam program dan file data komputer,
5. bahwa keempat kategori di atas secara hati-hati dan terus-menerus harus dicek oleh orang-orang yang independen.

Selain itu, penggiliran kerja juga perlu dilaksanakan agar dapat menambah pemahaman atau pengetahuan pegawai terhadap sistem dan terhadap hal-hal lain yang mungkin sebelumnya tidak pernah diketahuinya, serta dapat membantu manajemen untuk menemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sepanjang personil yang menggantikannya tidak bekerja sama dengan personil yang digantikan yang melakukan penyimpangan.

Pengendalian internal didefinisikan oleh The Committee of Sponsoring Organizations (COSO), 1992 (dalam Baihaki Mustafa, 2004:7), terdiri atas lima komponen yang saling terkait, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*)

Komponen pertama, lingkungan pengendalian adalah tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan seluruh sikap top

manajemen, dewan komisaris, dan pemilik entitas tentang pentingnya pengendalian dalam suatu entitas, yang mencakup :

- a. Integritas dan nilai etika (*integrity and ethical values*)
- b. Komitmen terhadap kompetensi (*commitment to competence*)
- c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit (*Board of Directors or Audit Committee participation*)
- d. Filosofi dan gaya operasi manajemen (*management's philosophy and operating style*)
- e. Struktur organisasi (*organizational structure*)
- f. Pemberian otoritas dan tanggung jawab (*assignment of authority and responsibility*)
- g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia (*human resource policies and practices*)

2. Penaksiran risiko (*risk assessment*)

Penaksiran risiko dalam sistem pengendalian intern adalah usaha manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan dalam menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Bila manajemen merespon atau dapat mengakses risiko secara efektif, maka auditor biasanya akan dapat mengumpulkan bukti dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan bila manajemen gagal dalam melakukannya.

3. Aktivitas pengendalian (*control activities*)

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang objektif. Aktivitas pengendalian dapat digolongkan dalam pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas, pendokumentasian dan pencatatan yang cukup, pengawasan aset antara catatan dan fisik, serta pemeriksaan independen atas kinerja.

4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*)

Informasi dan komunikasi dalam pengendalian intern adalah metode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan semua transaksi entitas, serta untuk memelihara akuntabilitas yang berhubungan dengan aset. Transaksi-transaksi harus memuaskan dalam hal eksistensi, kelengkapan, ketepatan, klasifikasi, tepat waktu, serta dalam *posting* dan mengikhtisarkan.

5. Pemantauan (*monitoring*)

Kegiatan pemantauan berkaitan dengan penilaian atas kualitas kinerja struktur pengendalian intern yang dilakukan oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian yang sudah ditetapkan tersebut memang benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tujuannya semula serta untuk menentukan bahwa pengendalian tersebut memang benar-benar perlu diperbaiki agar sesuai dengan berubahnya kondisi yang ada. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sumber seperti menilai pengendalian yang ada, mempelajari laporan auditor,

review atas laporan pengecualian, melalui saran-saran dari anggota organisasi atau rapat-rapat pimpinan, bahkan dapat pula dilakukan melalui keluhan dari pelanggan.

Kerangka pengendalian internal menurut COSO tidak hanya mempertimbangkan penilaian atas pengendalian keras (*hard controls*) seperti pemisahan tugas, pengawasan asset, sistem pencatatan dan pemantauan kegiatan, tetapi juga mempertimbangkan pengendalian lunak (*soft controls*) seperti integritas dan nilai etis, komitmen terhadap kompetensi, serta filosofi dan gaya operasi manajemen. COSO menekankan pengendalian intern kepada penyebab akar yang sistemik (*systemic root causes*), berfokus pada pelanggan (*customer-focused*), dan berorientasi pada hasil (*outcome oriented*).

Pengendalian internal tidak mungkin efektif melalui keempat komponen (penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan), tanpa lingkungan pengendalian yang efektif. Jadi, lingkungan pengendalian merupakan fondasi bangunan sistem pengendalian intern. Dalam membangun sistem pengendalian intern, sudah seharusnya memperhatikan juga pembangunan integritas, nilai etika, dan moral sumber daya manusia pelaksanaanya. Dengan kata lain, membangun akhlak sumber daya manusia merupakan bagian integral dalam kerangka membangun sistem pengendalian internal.

2.5 Perkreditan

2.5.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu: *credere*, yang artinya “kepercayaan” atau “amanat”, atau dari bahasa latin, *creditum*, yang artinya hampir sama, “kepercayaan akan kebenaran” atau “amanat”. Pengertian kredit menurut Veithzal, Rivai (2007:4) dapat diartikan sebagai penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau debitur / borrower) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

2.5.2 Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2010 : 100), dalam prakteknya tujuan pemberian kredit adalah untuk (1) mencari keuntungan (2) membantu usaha debitur (3) membantu pemerintah. Dengan demikian tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank/lembaga pembiayaan bukan bank yang akan mengemban tugas sebagai *agent of development* adalah untuk:

1. Turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan organisasi

3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya

Firdaus, H. Rachmat dan Maya Ariyanti (2004 : 5-6) menerangkan bahwa Fungsi kredit dewasa ini pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (to serve the society) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

Hal yang sama dijelaskan juga oleh Kasmir (2010: 101), fungsi dari kredit adalah sebagai berikut: (1) untuk meningkatkan daya guna uang, (2) untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, (3) untuk meningkatkan peredaran barang, (4) sebagai alat stabilisasi ekonomi, (5) untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, (6) untuk meningkatkan kegairahan usaha, (7) untuk meningkatkan hubungan internasional.

2.5.3 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2010 : 103-106) jenis-jenis kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga pembiayaan bukan bank untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis kredit antara lain :

1. Kredit dilihat dari segi tujuannya:
 - a. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi

- b. Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi
 - c. Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagang yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut.
2. Kredit dilihat dari jangka waktunya:
- a. Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja
 - b. Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu 1 sampai 3 tahun dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi
 - c. Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun
3. Kredit dilihat dari segi jaminannya:
- a. Kredit Tanpa Jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.
 - b. Kredit Jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan menggunakan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
4. Kredit dari segi kegunaanya:

- a. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
- b. Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank untuk melakukan investasi atau penanaman modal, yang ditujukan untuk memperluas usahanya atau membangun proyek/pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi.

2.5.4 Kegiatan Perkreditan

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan aset bank atau lembaga pembiayaan bukan bank. Menurut Dendawijaya, Lukman (2001) Kegiatan perkreditan diwujudkan dengan menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*Idle Fund/Surplus Unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana/kekurangan dana.

Suyatno Thomas (2001) menyatakan sistem dan prosedur umum pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1) Permohonan Kredit

Permohonan fasilitas kredit mencakupi:

- a. Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit
- b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan

- c. Permohonan perpanjangan atau pembaharuan masa kredit yang telah berakhir jangka waktunya
- d. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan fasilitas kredit yang sedang berjalan.

2) Penyelidikan dan Analisis Kredit

Yang dimaksud dengan penyelidikan kredit adalah pekerjaan yang meliputi :

- a. Wawancara dengan pemohon kredit (debitur)
- b. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah
- c. Pemeriksaan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang ditemukan nasabah dan informasi lain yang diperoleh
- d. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan

Sedangkan analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

- a. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan kredit
- b. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan

pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan atau permohonan kredit nasabah.

Menurut Kasmir (2010 : 109) terdapat prinsip-prinsip pemberian kredit yang dikenal dengan prinsip 5 C yaitu :

- a. *Character*, tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank atau lembaga pembiayaan bukan bank, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dipercaya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai kemauan debitur membayar kreditnya.
- b. *Capacity*, untuk melihat kemampuan calon debitur dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan
- c. *Capital*, untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki debitur terhadap usaha yang akan dibiayai bank atau lembaga pembiayaan bukan bank.
- d. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik yang berupa fisik maupun non fisik. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank atau lembaga pembiayaan bukan bank dari resiko kerugian, seperti terjadinya piutang tak tertagih..

- e. *Condition of Economy*, dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

3) Keputusan atas Permohonan Kredit

Dalam hal ini yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan permohonan kredit harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit.

4) Penolakan Permohonan Kredit

Penolakan permohonan dapat terjadi apabila :

- a. Penolakan permohonan kredit yang secara nyata dianggap oleh bank atau lembaga pembiayaan bukan bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan.
- b. Adanya keputusan penolakan dari pimpinan mengenai permohonan kredit

5) Persetujuan Permohonan Kredit

Yang dimaksud dengan persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk menyetujui sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Untuk melindungi kepentingan bank atau lembaga pembiayaan bukan

bank dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, maka biasanya ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh debitur. Langkah-langkah yang harus diambil antara lain : 1) Surat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada pemohon, 2) Peningkatan jaminan, 3) Penandatanganan perjanjian kredit, 4) Informasi untuk bagian lain, 5) Pembayaran bea materai kredit, 6) Asuransi barang jaminan, dan 7) Asuransi kredit.

6) Pencairan Fasilitas Kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank atau lembaga pembiayaan bukan bank.. Bank atau lembaga pembiayaan bukan bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh debitur, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi debitur telah dilaksanakan. Perlu diketahui bahwa peningkatan jaminan dan penandatanganan warkat-warkat kredit (perjanjian kredit) mutlak harus mendahului pencairan kredit.

Apabila calon debitur telah memenuhi semua syarat dan prosedur kredit, maka bank akan menetapkan waktu kapan kredit tersebut dapat dicairkan. Pada saat kredit akan dicairkan terlebih dahulu debitur akan menandatangani surat atas akte perjanjian kredit beserta lampiran-lampirannya.

7) Pelunasan Fasilitas Kredit

Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban nasabah terhadap bank atau lembaga pembiayaan bukan bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit.

Administrasi dan pembukuan kredit merupakan proses pengumpulan dan penyajian informasi perkreditan pada suatu bank. Dari administrasi kredit ini, bank dapat memberikan pendapat sebagai alat dalam menunjang kegiatan-kegiatan dari proses perkreditan secara perorangan maupun secara keseluruhan. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai alat dalam sistem dokumentasi perkreditan. Dengan adanya administrasi kredit yang baik, dapat mempermudah laporan-laporan di bidang perkreditan baik untuk kepentingan intern (kepentingan manajemen dan dewan komisaris) maupun untuk pihak ekstern (debitur).

Bank atau lembaga pembiayaan bukan bank harus memastikan bahwa kegiatan usaha debitur mampu untuk menutupi pinjaman yang telah dicairkan bank, sehingga pembinaan dan pengawasan secara terus menerus harus dilakukan untuk menghindari munculnya kredit bermasalah atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman beserta bunganya kepada bank atau lembaga pembiayaan bukan bank.

2.5.5 Jaminan Kredit

Dalam rangka menyalurkan kredit, maka pihak pembiayaan akan mensyaratkan adanya jaminan atau agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut kepada calon debitur yang mengajukannya. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya wanprestasi dari debitur, sehingga jaminan kredit dapat berfungsi sebagai sumber dana untuk melunasi pokok dan tunggakan bunganya.

Pengertian jaminan kredit adalah suatu bentuk tanggungan atas pelaksanaan suatu prestasi yang berupa pengembalian kredit berdasarkan pada suatu perjanjian kredit, sehingga perjanjian pengikatan jaminannya bersifat

accessoir, yaitu perjanjian yang keberadaannya dikaitkan dengan suatu perjanjian kredit yang dibuat antara pihak debitur dengan pihak kreditur.

Peranan jaminan dalam suatu pemberian kredit, adalah untuk mengurangi resiko yang mungkin timbul dengan tidak dibayarnya kembali kredit yang diberikan.

2.6 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

2.6.1 Pengertian BPKB

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, atau disingkat BPKB, adalah buku yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB dapat disamakan dengan *certificate of ownership* yang disempurnakan dan merupakan dokumen penting. BPKB juga dapat dijadikan sebagai jaminan atau tanggungan dalam pinjam-meminjam berdasarkan kepercayaan masyarakat.

2.6.2 Fisik BPKB

BPKB berbentuk buku berukuran ukuran 17x12 cm, dengan lembar kulit berwarna biru tua dan tulisan putih perak, serta dibubuhi nomor BPKB. BPKB terdiri atas 22 halaman dengan warna dasar keabu-abuan. Untuk mencegah pemalsuan, BPKB juga dilengkapi dengan tanda air (*watermark*), serat warna-warni tidak kasat mata (*invisible fibre*), dan benang pengaman hologram.

2.6.3 Isi BPKB

Isi BPKB meliputi; identifikasi kendaraan bermotor (seperti: nomor polisi, merk dan tipe, tahun pembuatan, nomor mesin, nomor rangka, dan juga asal-usul kendaraan seperti negara pembuat, cara impor, nama perusahaan penjual atau dealer, dan nama pembeli atau pemilik), keterangan kepabeanan, pendaftaran polisi, catatan tentang pelunasan pajak/BBN, catatan pejabat Polisi Lalu Lintas. Selain itu, BPKB juga memuat data mutasi yakni apabila kendaraan berganti pemilik, nomor polisi, atau apabila kendaraan tersebut mengalami modifikasi ataupun diubah cirinya.

2.6.4 Komponen BPKB

BPKB mempunyai beberapa komponen yang terdiri dari: blanko BPKB, formulir permohonan, kartu induk BPKB, buku register, formulir tanda periksa, formulir permohonan mutasi, serta brosur yang berhubungan dengan BPKB.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Buku_Pemilik_Kendaraan_Bermotor).

2.7 Konsep Piutang

2.7.1 Pengertian Piutang

Dalam makalahnya, Abdul Rosid (2011) menjelaskan pengertian piutang usaha adalah jumlah pembelian secara kredit dari pelanggan yang diperkirakan dapat akan tertagih dalam waktu 30 sampai 60 hari. Piutang ini timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa.

Piutang merupakan kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya politik penjualan kredit. Politik penjualan kredit ini merupakan politik yang biasa dilakukan dalam dunia bisnis untuk merangsang minat para pelanggan. Jadi politik ini sengaja dilakukan untuk memperluas pasar dan memperbesar hasil penjualan. Tentu saja dengan politik penjualan kredit ini akan menimbulkan resiko bagi perusahaan akan tidak dapat ditagihnya sebagian atau bahkan mungkin seluruh dari piutang tersebut. risiko ini dikontrol dengan cara penetapan batasan kredit yang seksama dan beberapa produk mensyaratkan adanya jaminan yang biasanya dalam bentuk properti.

Politik penjualan kredit dapat menimbulkan keuntungan-keuntungan dalam bentuk :

- a) Kenaikkan hasil penjualan
- b) Kenaikkan Laba. Hal ini adalah sebagai akibat dari kenaikan dalam hasil penjualan akan dapat menimbulkan kenaikan pada laba perusahaan.
- c) Memenangkan persaingan. Dalam dunia bisnis saat ini hampir semua perusahaan melaksanakan politik penjualan kredit. Oleh karena itu untuk menjaga posisi perusahaan di dalam persaingan maka haruslah dilakukan politik penjualan kredit tersebut, apabila tidak ingin merosot dalam posisi persaingan di pasar. Politik penjualan yang agresif akan dapat merangsang minat calon konsumen akan dimungkinkan untuk memakai dan menikmati kegunaan barang yang dibelinya tanpa harus mengeluarkan uang yang besar pada saat membeli, sehingga pembeli dapat menikmati sekarang juga dengan membayarnya nanti dikemudian hari.

2.7.2 Klasifikasi Piutang

Piutang dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu:

1) Piutang Usaha

Transaksi paling umum yang menciptakan piutang adalah penjualan barang dagang atau jasa secara kredit. piutang dicatat dengan mendebet akun piutang usaha. piutang usaha (account receivables) semacam ini normalnya diperkirakan akan tertagih dalam periode waktu yang relatif pendek, seperti 30 atau 60 hari. piutang usaha diklasifikasikan dalam aktiva lancar.

2) Wesel Tagih

Sepanjang wesel tagih diperkirakan akan tertagih dalam setahun, maka biasanya diklasifikasikan dalam neraca sebagai aset lancar. wesel tagih (notes receivables) adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan, dimana pelanggan dimaksud telah menerbitkan surat utang formal kepada perusahaan.

Promes atau wesel biasanya digunakan untuk periode kredit lebih dari enam puluh hari. sebagai contoh, sebuah dealer mobil atau perabotan rumah tangga biasanya meminta uang muka pada saat penjualan dan menerima promises untuk sisanya. promises atau wesel semacam itu umumnya mengharuskan pelanggan untuk melakukan pembayaran secara bulanan.

Promes biasanya digunakan untuk menyelesaikan piutang usaha pelanggan. biasanya wesel tagih dan piutang usaha berasal dari transaksi penjualan, maka hal itu kadang-kadang disebut piutang dagang (trade receivables).

3) Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam satu tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika penagihannya lebih dari satu tahun, maka piutang ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dan dilaporkan di bawah judul investasi piutang lain-lain (other receivables) meliputi piutang bunga, piutang pajak, dan piutang dari pejabat atau karyawan.

2.7.3 Faktor yang Mempengaruhi Besar Kecilnya Piutang

Besar kecilnya piutang dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1) Volume Penjualan Kredit

Makin besar jumlah penjualan kredit dari keseluruhan penjualan akan memperbesar jumlah piutang dan sebaliknya makin kecil jumlah penjualan kredit dari keseluruhan piutang akan memperkecil jumlah piutang.

2) Syarat Pembayaran Bagi Penjualan Kredit

Semakin panjang batas waktu pembayaran kredit berarti semakin besar jumlah piutangnya dan sebaliknya semakin pendek batas waktu pembayaran kredit berarti semakin kecil besarnya jumlah piutang.

3) Ketentuan Tentang Batas Volume Penjualan Kredit

Apabila batas maksimal volume penjualan kredit ditetapkan dalam jumlah yang relatif besar maka besarnya piutang juga semakin besar.

4) Kebiasaan Membayar Para Pelanggan Kredit

Apabila kebiasaan membayar para pelanggan dari penjualan kredit mundur dari waktu yang dipersyaratkan maka besarnya jumlah piutang relatif besar.

5) Kegiatan Penagihan Piutang Dari Pihak Perusahaan

Apabila kegiatan penagihan piutang dari perusahaan bersifat aktif dan pelanggan melunasinya maka besarnya jumlah piutang relatif kecil, tetapi apabila kegiatan penagihan piutang bersifat pasif maka besarnya jumlah piutang relatif besar.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai peranan audit operasional atas BPKB sebagai jaminan kredit dalam meminimalisasi piutang tak tertagih perusahaan. Audit operasional atas BPKB ini sangat penting untuk dilakukan, karena BPKB merupakan jaminan kredit satu-satunya yang digunakan perusahaan dalam pemberian kredit pada debitur. Jika BPKB yang diberikan debitur tidak asli atau tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan perusahaan, maka akan sulit untuk perusahaan dalam menagih piutangnya. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan.

Penelitian ini dilakukan pada Astra Credit Companies Cabang Padang, dengan horizon waktu yang digunakan adalah *cross sectional* karena penelitian dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan yaitu gambaran umum perusahaan dan data yang berhubungan dengan BPKB, serta data audit 2 periode yang berhubungan dengan BPKB debitur ACC. Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak dalam perusahaan yang erat hubungannya dengan prosedur BPKB, pengendaliannya serta audit operasional yang dilakukan terhadap BPKB. Pemilihan tempat wilayah penelitian didasarkan pertimbangan adanya hubungan emosional dengan pihak perusahaan serta lokasi perusahaan yang dekat dengan penulis sehingga dapat melancarkan penulis dalam proses penelitian.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan dan menyajikan data disertai analisis yang dapat memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhasil diperoleh, dikumpulkan selama penelitian, kemudian diproses untuk dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan dasar-dasar teori yang ada sehingga dapat memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu peninjauan langsung pada perusahaan yang diteliti untuk memperoleh data primer.

Data primer ini dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab dengan pejabat yang berwenang untuk memperoleh informasi sesuai dengan judul dan tujuan penelitian. Penulis mengumpulkan data mengenai perusahaan untuk memperoleh gambaran umum dan masalah khusus yang diteliti. Adapun data yang diperoleh, diharapkan dapat menjelaskan tentang kebijakan, sistem, prosedur yang berhubungan dengan BPKB.

b. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan terhadap aktivitas perusahaan yang erat kaitannya dengan masalah audit operasional dan prosedur BPKB. Yang diobservasi adalah dokumen-dokumen tentang BPKB serta dokumen audit operasionalnya. Data yang terkumpul digunakan untuk memvalidasi data yang didapat pada saat wawancara.

c. Dokumentasi (pencatatan)

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dokumen atau mengadakan catatan yang ada pada perusahaan.

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, serta literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti yang berguna sebagai pedoman teoritis pada waktu melakukan penelitian lapangan dan untuk mendukung serta menganalisis data.

3.4 Analisis Data

Data dan dokumen atas pelaksanaan yang diperoleh akan dianalisis dengan membandingkan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan, atau membandingkan hasil yang dicapai dengan standar yang ditetapkan. Standar dapat ditetapkan melalui keputusan direktur, ketetapan manajer, pengalaman masa lalu,

yang digunakan sebagai acuan untuk memenuhi serangkaian tugas dan tanggung jawab.

Kemudian data mengenai keamanan BPKB akan diolah dengan melakukan audit operasional yang dapat mendorong peningkatan keamanan atas jaminan yang ada di perusahaan tersebut. Data tersebut didapatkan dari wawancara dan observasi serta penelitian kepustakaan. Analisis dari data ini akan didapatkan sejauh mana peranan audit operasional atas BPKB sebagai jaminan kredit dalam meminimalisasi piutang tak tertagih pada Astra Credit Companies cabang Padang.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Astra Credit Companies berdiri sejak dimulai PT. Raharja Sedaya sebagai tulang punggung bisnis Astra Group. PT. Raharja Sedaya berdiri secara hukum pada tanggal 15 Juli 1982 dan mulai beroperasi pada tahun 1983 dengan misi menunjang penjualan produk Astra terutama dibidang *automotive*. Seiring dengan perkembangan waktu, PT. Raharja Sedaya tidak hanya membiayai produk *automotive* keluaran Astra, karena pada saat itu hampir semua jenis mobil dapat dibiayai oleh PT. Raharja Sedaya. Selain itu, PT. Raharja Sedaya juga membiayai alat berat yang banyak digunakan untuk kegiatan komersil perusahaan.

Pada tahun 1990 PT. Raharja Sedaya berubah menjadi PT. Astra Sedaya Finance. Selama perjalanan bisnisnya, PT. Astra Sedaya Finance seiring terjadi perubahan dalam struktur kepemilikan saham. Tahun 1992 PT. General Electric Service masuk sebagai pemilik PT Astra Sedaya Finance selain PT. Astra Internasional, Tbk. yang berafiliasi dengan PT Raharja Sedaya digabungkan dalam satu manajemen di bawah brand Astra Credit Company (ACC). Astra Credit Company (ACC) mempunyai logo orang senyum yang sedang mengendarai mobil sambil mengacungkan jempol dan slogan memberi kemudahan. Berikut dibawah ini logo dari Astra Credit Company (ACC).

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Gambar 1
Logo Astra Credit Company (ACC)



Masih dalam periode yang sama, ACC kemudian berubah nama menjadi Astra Credit Companies yang menggambarkan bahwa terdapat beberapa perusahaan di bawah manajemen ACC. Perusahaan di bawah manajemen ACC yaitu (1) Astra Sedaya Finance, (2) Swadharma Bhakti Sedaya Finance, (3) Staco Estika Sedaya Finance, (4) Astra Auto Finance dan (5) Pratama Sedaya Finance.

4.1.2 Produk Layanan Astra Credit Companies

ACC memberikan berbagai produk & servis pembiayaan kendaraan bermotor untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, diantaranya :

a. New Car Financing

Sebagai perusahaan pembiayaan kendaraan terbesar dan terpercaya, ACC memberikan solusi pembiayaan segala merek kendaraan baru, Misalnya Toyota, Daihatsu, Isuzu, Peugeot, BMW, Nissan Diesel.

b. Used Car Financing

ACC juga memberikan solusi pembiayaan kendaraan bekas segala merek bagi pelanggan. Melalui ACC Used Car Distribution channels yaitu (1) *Used Car Dealer (BETA)* dengan fasilitas pembiayaan ACC yang membantu pelanggan membeli kendaraan bekas secara kredit dari Dealer. (2) *Direct to Customer*

(C2C program) dengan fasilitas pembiayaan ACC yang membantu pelanggan untuk membeli kendaraan bekas secara kredit dari perorangan.

c. *Fleet Financing*

ACC memberikan solusi pembiayaan untuk kendaraan atau peralatan yang digunakan untuk kegiatan komersil di perusahaan dalam bidang transportasi, perminyakan, bisnis Agro, dan sebagainya.

d. *Retail Commercial Financing*

Fasilitas pembiayaan untuk truk & pick up untuk bisnis Usaha Kecil Menengah.

e. *Other Services*

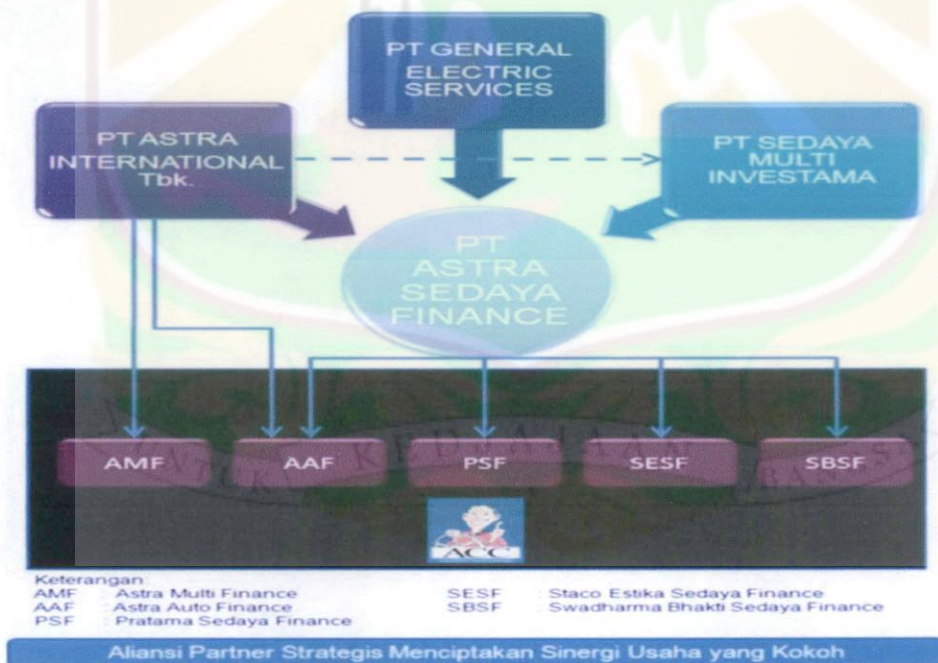
Bentuk pelayanan lainnya yang disediakan oleh ACC yaitu (1) ACC Credit Protection (ACP) merupakan jaminan pelunasan sisa kredit jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap customer, dimana keluarga tetap dapat memiliki kendaraan kesayangan, (2) ACC Gold Card merupakan kartu kredit yang dirancang khusus untuk memberikan keleluasaan keuangan dan tawaran layanan otomotif istimewa, sebagai wujud penghargaan kepada pelanggan setia ACC, (3) FASTrack Financing merupakan proses kredit yang super cepat dan selesai dalam 1 hari yang sama yang diberikan kepada customer aktif ACC yang memenuhi syarat dan terpilih, (4) Guarantee Assets Protection (GAP) merupakan asuransi kendaraan yang memberikan ganti rugi sebesar 100% dari harga beli kendaraan jika mobil hilang / rusak > 75% selama masa angsuran, (5) Direct to Customer (insurance) merupakan ACC billing, health & family protection, (6) Service Asuransi Astra Buana (AAB)

melalui ACC dan (7) STNK Service merupakan service perpanjangan STNK melalui ACC.

4.1.3 Kepemilikan Saham Astra Credit Companies (ACC)

Saham PT. Astra Sedaya Finance dimiliki oleh PT. Astra International, Tbk (44,28%) & PT. General Electric Services (47%) serta PT. Sedaya Multi Investama (8,72 %) dan ada 5 perusahaan lainnya yang berada di bawah naungan brand “ACC” yaitu PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance (SBSF), PT. Staco Estika Sedaya Finance (SESF), PT. Astra Multi Finance (AMF), PT. Astra Auto Finance (AAF), PT. Pratama Sedaya Finance (PSF), yang mana melalui aliansi partner strategis akan menciptakan sinergi usaha yang kokoh.

Gambar 2
Kepemilikan Saham Astra Credit Companies



4.1.4 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan

Struktur organisasi memiliki peranan yang sangat penting pada semua perusahaan, yaitu untuk memudahkan manajemen perusahaan dalam pembagian kerja sesuai dengan kemampuan karyawannya. Struktur organisasi suatu perusahaan akan disesuaikan dengan jenis dan keperluan perusahaan. Begitu juga dengan gambar struktur organisasi Astra Credit Companies Cabang Padang seperti berikut:

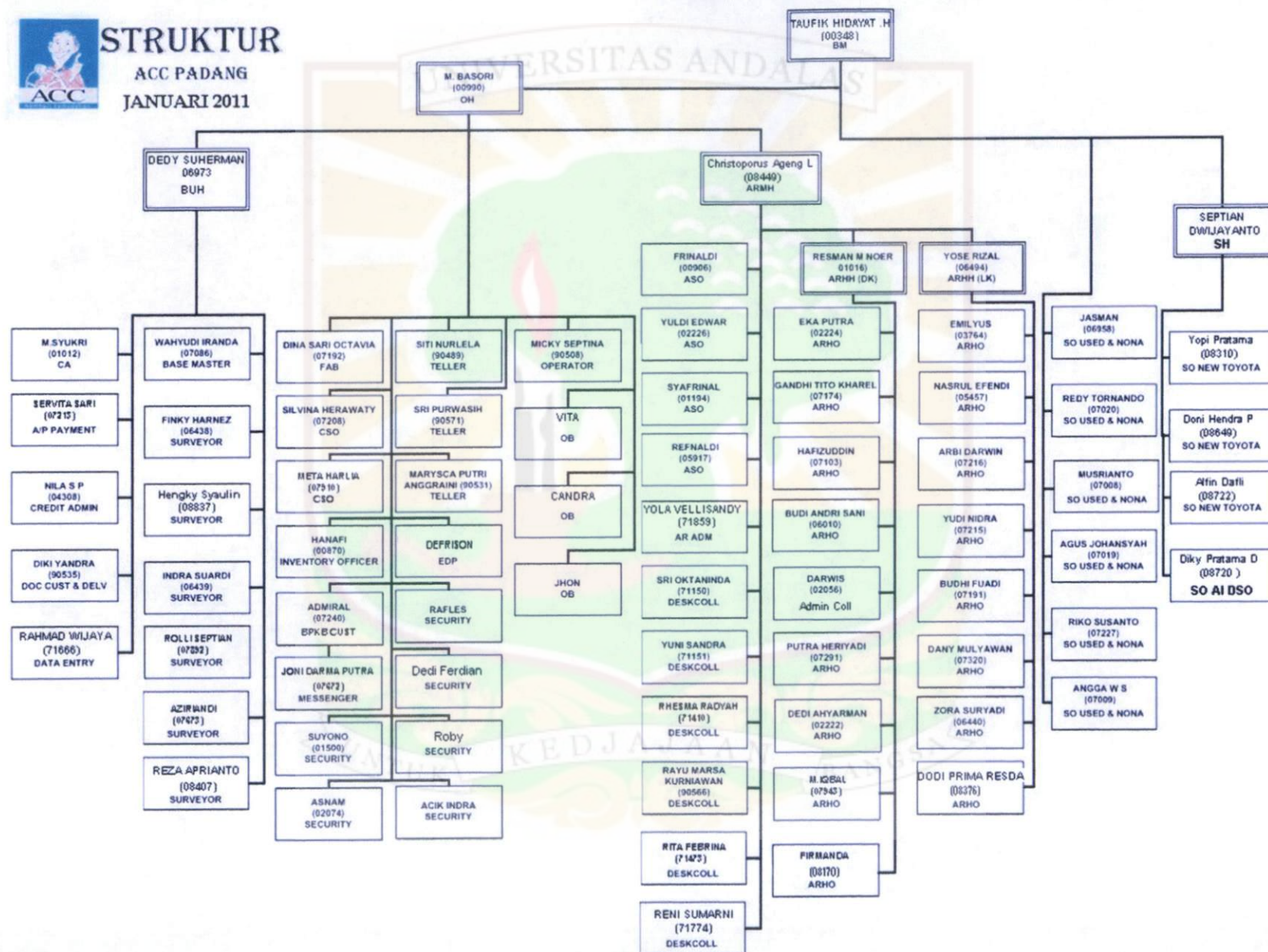




STRUKTUR

ACC PADANG

JANUARI 2011



Keterangan:

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| 1. BM | : Branch Manager |
| 2. OH | : Operation Head |
| 3. SH | : Sales Head |
| 4. ARMH | : AR. Management Head |
| 5. CA | : Credit Analise |
| 6. BPKB Cust | : BPKB Custodian |
| 7. OB | : Cleaning Service |
| 8. ARHH | : AR Handling Head |
| 9. ASO | : Account Sollution Officer |
| 10. Bs. Master | : Base Master |
| 11. Surfeyor | : Surfeyor |
| 12. ARHO | : AR. Handling Officer |
| 13. SO Used | : Sales Officer Used |
| 14. SO NONA | : Sales Officer Non Astra |

Pada struktur organisasi tersebut ditemui 4 bidang pekerjaan dengan tugasnya seperti berikut :

1. Sales, dengan tugasnya untuk melakukan proses marketing.
2. Underwriting, dengan tugasnya untuk kegiatan melakukan proses kredit mulai dari survei, analisa kredit sampai keputusan kredit.
3. AR Management, dengan tugasnya untuk melakukan penagihan piutang dengan apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh pelanggan
4. Service, dengan tugasnya untuk melakukan penerimaan pembiayaan angsuran dan pelayanan terhadap pelanggan.

4.1.5 Visi, misi, serta nilai-nilai Astra Credit Companies (ACC)

Visi Astra Credit Companies (ACC) yaitu menjadikan perusahaan keuangan pilihan yang terdepan dalam memberikan solusi dan pelayanan bagi pelanggan. Sedangkan misi Astra Credit Companies (ACC) untuk memberikan solusi bagi pelanggan untuk menikmati kehidupan yang lebih baik.

Sedangkan nilai-nilai yang dimiliki ACC adalah (1) integritas, yaitu mencerminkan citra positif perusahaan yang dinilai dari kejujuran, loyalitas, tanggungjawab, keadilan dan rasa memiliki, (2) kerjasama, bahwa untuk mencapai tujuan perusahaan, diperlukan kerjasama yang baik dan saling menghargai, (3) kepuasan pelanggan adalah semua aktivitas harus menuju kepada kepuasan pelanggan, (4) kualitas merupakan semua proses harus benar dari awal untuk mencapai six sigma.

Gambar 3

Visi, misi dan nilai-nilai ACC



Visi, misi dan nilai-nilai merupakan pegangan yang harus diikuti oleh karyawan. Hal ini merupakan keyakinan dasar yang dianut oleh sebuah organisasi misalnya jati diri perusahaan.

4.2 Internal Control Terhadap Jaminan Kredit (BPKB) pada ACC

Pengendalian internal terdiri dari rencana organisasi serta seluruh metode koordinasi dan pengukuran yang diterapkan oleh perusahaan untuk menjaga asetnya, menguji keakuratan dan keandalan data akuntansinya, mendukung efisiensi dan efektivitas operasional serta mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan manajerial yang telah ditetapkan

Semua BPKB sebagai jaminan kredit di ACC perlu dikendalikan dengan cara menyimpan di dalam gudang yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1) Untuk nomor kontrak yang menggunakan tulisan tangan di masukan ke dalam satu brankas yang tidak berdasarkan urutannya.
- 2) Untuk nomor kontrak yang berasal dari sistem (barkot) dimasukan ke brankas berdasarkan nomor urut kontrak.

Karena BPKB merupakan aset bagi debitur ACC dan merupakan jaminan kredit satu-satunya bagi ACC, maka BPKB tersebut disimpan di tempat yang aman, agar tidak terjadi hal-hal yang merusak BPKB tersebut. Bentuk pengamanan yang dilakukan ACC untuk mengamankan BPKB adalah

- Alarm, digunakan agar BPKB tidak dapat disentuh oleh orang yang tidak berwenang, seperti: maling, dan sebagainya.

- Disimpan di dalam brankas yang terbuat dari baja, sehingga BPKB tetap terjaga dengan baik, walaupun terjadi musibah, seperti: bencana alam, kebakaran, dan lain-lain.
- CCTV, digunakan agar dapat melacak kondisi-kondisi yang berhubungan dengan masuk dan keluar BPKB.
- Yang bertanggungjawab atas gudang BPKB di ACC (pemegang kunci) adalah kepala cabang ACC Padang.

BPKB sebagai jaminan kredit satu-satunya sangat diperhatikan dan dijaga keamanannya oleh perusahaan. Ini terbukti dari tempat penyimpanan yang baik dan berbagai alat yang disediakan untuk keamanan BPKB. Ini merupakan bentuk internal control perusahaan dalam menjaga jaminan kredit yang dimiliki debiturnya supaya tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan, seperti: rusak karena bencana alam, dan sebagainya.

4.3 Prosedur *In-Out* BPKB Pada Astra Credit Companies Cabang Padang

Astra Credit Companies (ACC) memilih BPKB sebagai satu-satunya jaminan kredit yang diajukan untuk debiturnya. Pihak yang menangani BPKB ini disebut dengan “BPKB Custodian”. BPKB Custodian ini dijabat oleh seorang karyawan Astra Credit Companies yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sangat baik tentang BPKB.

4.3.1 Prosedur BPKB Masuk ke Astra Credit Companies (ACC) Cabang Padang

Berdasarkan analisis kredit yang dinyatakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan kredit.

Supaya permohonan kredit yang diajukan ACC untuk debeturnya sukses termasuk jaminan yang diberikan debitur, maka ACC menyediakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh debeturnya yang berlaku untuk kendaraan baru dan kendaraan bekas. Prosedur BPKB sebagai jaminan untuk kedua jenis kendaraan ini tentu berbeda. Oleh karena itu, prosedur BPKB masuk ke ACC juga harus dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Kendaraan Baru

Untuk kendaraan baru, Buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB);

- 1) didapatkan dari dealer, tempat kendaraan dibeli. ACC bisa mendapatkan BPKB dengan cara mendatangi dealer kendaraan secara langsung, atau sebaliknya, dealer yang menyerahkan BPKB kepada ACC dengan didampingi oleh pemilik BPKB.
- 2) ACC mengecek kebenaran BPKB, dengan cara mencocokkan antara informasi yang tertera di faktur pembelian (dari dealer) dengan informasi yang ada di BPKB.

- 3) Selanjutnya melihat data yang ada pada "Aging SP BPKB" untuk melihat nomor kontrak untuk dicocokkan dengan faktur yang ada. Aging SP BPKB adalah informasi yang menjelaskan tentang kerjasama antara dealer resmi di Indonesia dengan ACC.
- 4) Catat nomor kontrak di BPKB, dengan cara:
- Awalnya, pencatatan nomor kontrak dilakukan di atas kertas putih ukuran kecil, kemudian ditempelkan pada bagian kiri atas BPKB.
 - Selanjutnya, kumpulan BPKB dengan nomor kontrak bertuliskan tangan tersebut dimasukan ke dalam sistem, agar data dapat terjaga dan mudah penelusurannya. Langkah berikutnya, nomor kontrak tersebut diprint (barkot). Langkah terakhir, nomor kontrak yang bertuliskan tangan diganti dengan barkot, kemudian ditempel di bagian kiri atas BPKB yang bersangkutan.
- Pengecualian untuk BPKB yang tidak memenuhi kriteria, segera dikembalikan ke dealer untuk diperbaiki. Namun, nomor kontrak BPKB tersebut tetap dimasukan ke sistem sebagai pedoman bahwa, BPKB tersebut sudah menjadi tanggungjawab ACC.
- 5) Langkah terakhir, BPKB disimpan di gudang, tepatnya di dalam brangkas sesuai urutannya, agar mudah pencariannya bila diperlukan kembali.

2. Kendaraan Bekas

Untuk kendaraan bekas, prosedur BPKB masuk di ACC memerlukan banyak berkas, karena BPKB tersebut masih atas nama pemilik lama, sedangkan

calon debitur ACC ini merupakan pemilik baru kendaraan. Jadi dalam prosedur BPKB kendaraan bekas dibutuhkan banyak dokumen terkait, agar BPKB sebagai jaminan ini dapat dijadikan senjata oleh ACC untuk menagih piutang pada debitur yang bersangkutan. Berikut adalah prosedur BPKB kendaraan bekas masuk ke ACC, yaitu:

- 1) BPKB diambil langsung oleh ACC ke dealer terkait, atau dealer menyerahkan BPKB ke ACC. Namun proses ini harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - KTP pemilik atas nama BPKB (dicek kebenaran dan masa berlakunya)
 - Kwitansi kosong, untuk bea balik nama BPKB dengan memakai materai.
 - Faktur pembelian, untuk dicocokkan dengan yang tertera di BPKB
 - Surat kontrak, berupa perjanjian oleh debitur untuk pengesahan kontrak debitur. Isi surat kontrak itu adalah nomor kontrak (yang tertera di sebelah kiri atas BPKB), dan hasil cek fisik kendaraan untuk mencocokkan dengan fisik gesekan (nomor rangka dan nomor mesin) untuk dicocokkan dengan yang tertera di BPKB.
 - Surat tanda nomor kendaraan (STNK), dicek masa berlakunya, agar mudah prosesnya, apalagi untuk penarikan.
- 2) Setelah semua dokumen terpenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan, maka langkah selanjutnya adalah memasukan nomor kontrak ke sistem, lalu print barkot, dan tempel di sebelah kiri atas BPKB.

- 3) Selanjutnya BPKB disimpan di gudang penyimpanan BPKB, yaitu di dalam brangkas sesuai dengan urutannya.

4.3.2 Prosedur BPKB Keluar dari Astra Credit Companies (ACC) Cabang Padang

Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban nasabah terhadap bank atau lembaga pembiayaan bukan bank yang berakibat dihapusnya ikatan perjanjian kredit. Terhapusnya ikatan perjanjian kredit, menjadikan BPKB sebagai jaminan kredit sudah boleh diambil oleh debitur sebagai pemilik BPKB jika debitur sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebagai kreditur.

BPKB sebagai jaminan kredit di ACC, keluar dari ACC tidak hanya karena kredit lunas oleh debitur ACC, namun juga disebabkan oleh dipinjam oleh biro jasa untuk keperluan bayar pajak, dan dipinjam dealer untuk keperluan mutasi dan bea balik nama (BBN). Jadi prosedur BPKB keluar dari ACC dapat dibagi menjadi 3 bagian, berdasarkan kegunaannya, yaitu:

- 1) Dipinjam oleh biro jasa untuk keperluan bayar pajak, mutasi, dan bea balik nama.
 - Bayar pajak, ini berlaku untuk semua kendaraan debitur, baik kendaraan baru maupun kendaraan bekas yang ada di ACC.
 - Mutasi, misalnya: penggantian nomor polisi dari daerah awal ke daerah yang dituju. Ini berlaku untuk kendaraan baru dan kendaraan bekas yang ditangani ACC.

- Bea balik nama (BBN), ini hanya berlaku untuk kendaraan bekas, yang ingin mengubah nama pemilik atas nama BPKB yang bersangkutan.

Pembayaran pajak, mutasi, dan bea balik nama untuk jangka waktu 5 tahun (harus ganti nomor polisi kendaraan) diperlukan BPKB asli oleh biro jasa. Berbeda untuk jangka waktu yang kurang dari 5 tahun, biro jasa hanya memerlukan copy-an BPKB yang bersangkutan yang dilengkapi dengan surat pernyataan. Ketiga hal diatas, dapat dilaksanakan ACC dengan bekerjasama dengan biro jasa terkait atas izin dari debitur yang bersangkutan.

- 2) Dipinjam oleh dealer untuk keperluan mutasi dan BBN bisa terlaksana, jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - Memberikan BPKB lain sebagai jaminan beserta dokumen terkait (faktur, KTP Pemilik, kwitansi, cek fisik kendaraan, dan foto jaminan).
 - Harga BPKB sebagai jaminan ini harus sama nilainya dengan BPKB yang dipinjam ke ACC.
- 3) Pembayaran kredit di ACC lunas. Debitur yang sudah melunasi kewajiban di ACC dapat mengambil BPKB kendaraannya dengan memperlihatkan KTP (kartu tanda penduduk) dan SIM (surat izin mengemudi) debitur yang bersangkutan. Kemudian, pihak ACC (BPKB Custodian) mem-fotocopy semua dokumen yang menjadi syarat pengambilan BPKB. Langkah selanjutnya, nomor kontrak yang

dimasukan ke sistem dikeluarkan, agar tidak terjadi konflik di masa depan.

Syarat pengambilan BPKB di atas berlaku untuk pengambilan BPKB yang dilakukan oleh debitur yang bersangkutan. Jika debitur berhalangan hadir atau mewakilkan kepada orang lain untuk pengambilan BPKB, maka syarat di atas tidak bisa digunakan, karena menyangkut keamanan BPKB. Oleh karena itu, syarat yang harus dipenuhi oleh perwakilan pengambilan BPKB adalah:

- Surat kuasa pakai materai Rp. 6.000
- KTP asli kedua pihak (pihak debitur dan pihak yang mewakili)
- Surat pernyataan yang disediakan ACC, dan ditandatangani oleh yang diberi kuasa

Setelah semua syarat tersebut dipenuhi, maka pihak ACC menghubungi debitur via telephon, untuk memastikan kebenaran perwakilan pengambilan BPKB dan pihak ACC mem-*fotocopy* semua dokumen terkait untuk dijadikan arsip.

Berbeda lagi syarat yang harus dipenuhi, jika pengambilan BPKB dilakukan oleh ahli waris, karena debitur sudah meninggal dunia. Syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris tersebut adalah:

- Surat kematian dari dokter
- Surat ahli waris
- Kartu keluarga
- KTP ahli waris dan debitur

Hal di atas merupakan syarat untuk pengambilan BPKB kendaraan milik pribadi, berbeda dengan pengambilan BPKB kendaraan milik perusahaan yang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- Adanya identitas perusahaan
- Struktur organisasi
- Stempel perusahaan

Dengan syarat yang tertera di atas, maka orang yang menandatangani kontrak dengan ACC untuk melakukan kredit atas nama perusahaan tersebut langsung bisa mengambil BPKB kendaraan yang bersangkutan. Namun pengambilan BPKB tidak dapat terlaksana, jika pengambilan BPKB dilakukan oleh perwakilan (bukan orang yang menandatangani kontrak) jika tidak memenuhi syarat sebagai berikut:

- Surat kuasa
- Surat pernyataan
- KTP kedua pihak

Jika syarat sudah terpenuhi, maka pihak ACC akan menghubungi orang yang menandatangani kontrak kredit di ACC, untuk memastikan kebenaran perwakilan pengambilan BPKB.

Jika semua syarat untuk BPKB keluar sudah dipenuhi oleh debitur atau perwakilannya, maka dapat dipastikan bahwa debitur akan menerima surat tanda terima BPKB berwarna kuning dan surat tanda terima BPKB berwarna putih yang akan dijadikan arsip oleh BPKB Custodian. Surat tanda terima BPKB ini

digunakan, agar BPKB Custodian dapat memecahkan konflik yang berhubungan dengan BPKB di masa depan, misalnya: BPKB hilang oleh debitur.

Prosedur *In-Out* Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Pada Astra Credit Companies Cabang Padang sudah bisa dikatakan memenuhi semua prosedur yang telah ditetapkan oleh para ahli. Astra credit companies mengharuskan calon debiturnya untuk memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkannya agar permohonan kredit yang diajukan oleh debitur bisa diterima, dan debitur yang melunasi atau meminjam jaminan pada astra credit companies juga harus memenuhi semua persyaratan, agar bisa mendapatkan BPKB untuk berbagai keperluan.

4.4 Audit Operasional atas BPKB Sebagai Jaminan Kredit pada Astra Credit Companies (ACC)

BPKB merupakan jaminan kredit satu-satunya yang disyaratkan oleh ACC untuk debiturnya. Untuk menghindari resiko kredit di masa yang akan datang, maka ACC melakukan audit operasional terhadap BPKB yang dinamakannya dengan "*audit self*" tersebut karena audit operasional merupakan pemeriksaan operasional yang memberi perhatian dan menemukan masalah operasi serta memberitahukannya pada manajemen puncak. Akan tetapi yang utama sebenarnya menyelesaikan masalah dan memberi rekomendasi tindakan yang realistis pada manajemen.

4.4.1 Pelaksana Audit Operasional atas BPKB Pada ACC Cabang Padang

Pihak yang melaksanakan audit operasional atas BPKB di ACC dilakukan oleh BPKB Custodian yang dijabat oleh Bapak Admiral. Bapak Admiral merupakan salah satu karyawan ACC yang sudah memiliki pengalaman kerja lebih dari 3 tahun di ACC cabang Padang, namun Auditing bukan merupakan latar belakang pendidikan Bapak Admiral. Disamping melakukan audit operasional atas BPKB, Bapak Admiral juga bertugas melakukan prosedur In-Out terhadap BPKB di ACC. Aktivitas yang ditangani oleh BPKB Custodian ini yang menyebabkan ACC menyebut audit operasional yang dilaksanakannya dengan sebutan "Audit Self".

Dalam melakukan audit atas BPKB ini, BPKB Custodian (Bapak Admiral) disaksikan oleh Operation Head yang dijabat oleh Bapak M. Basori. Selaku pimpinan ACC Cabang Padang, Bapak M. Basori bertanggungjawab penuh terhadap semua aktivitas perusahaannya, termasuk dalam pengamanan BPKB sebagai jaminan kredit satu-satunya di ACC. Hal ini dilakukan agar audit operasional yang dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh manajemen ACC, sehingga perusahaan dapat meminimalisir resiko kredit yang mungkin akan terjadi di masa depan.

Berdasarkan teori dari beberapa ahli yang dijelaskan pada bab 2 skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa audit operasional seharusnya dilakukan oleh auditor internal yang bertugas hanya melakukan audit tersebut, memiliki sifat independen

(tidak terpengaruh oleh apa dan siapapun), serta memiliki kompetensi auditing yang maksimal agar audit operasional yang dilakukannya efektif.

Teori diatas diperjelas oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Annisa Fitrianti tahun 2006, pelaksanaan audit operasional bisa dikategorikan memadai, jika:

- a. Internal auditor yang melaksanakan audit operasional bersifat independen dan kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- b. Pelaksanaan audit operasional terhadap pengendalian internal suatu fungsi perusahaan didasarkan pada program pemeriksaan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- c. Adanya staf internal auditor yang mempunyai latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang sesuai dengan bidangnya.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksana audit operasional atas BPKB di ACC Cabang Padang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh para ahli auditing. Ini dapat menyebabkan pelaksanaan audit operasional atas BPKB di ACC Cabang Padang belum bisa dikatakan efektif dan memadai.

4.4.2 Pelaksanaan Audit Operasional Atas BPKB Pada ACC Cabang Padang

Untuk meminimalisir resiko kredit masa depan dan dapat mencapai tujuan organisasinya, maka ACC melakukan audit operasional atas BPKB sebagai

jaminan kredit di perusahaannya. Tahapan audit operasional yang dilakukan oleh BPKB Custodian dalam melakukan audit terdiri dari:

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan pendahuluan ini, BPKB Custodian sebagai pelaksana audit tidak perlu lagi mempelajari prosedur In-Out BPKB serta syarat yang ditetapkan ACC atas penerimaan dan pengeluaran BPKB ini, karena prosedur tersebut merupakan sebagian aktivitas rutin yang dilakukan oleh BPKB Custodian. Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa BPKB Custodian mengaudit aktivitas sendiri atau disebut juga dengan istilah "Audit Self". BPKB Custodian melaksanakan audit operasional atas BPKB secara berkala dengan 2 cara yaitu:

1) Cara Acak

Cara acak maksudnya adalah mengambil beberapa BPKB yang dijadikan jaminan di ACC untuk ditelusuri keberadaan dan kebenarannya. Audit operasional jenis ini dilakukan satu kali dalam sebulan. Ini dilakukan dalam rangka pengamanan BPKB secara rutin.

2) Cara Keseluruhan, maksudnya adalah mengambil semua BPKB yang dijadikan jaminan kredit di ACC untuk ditelusuri keberadaan dan kebenarannya. Audit operasional ini dilakukan sekali 3 bulan, karena membutuhkan waktu yang lama untuk audit jenis ini.

2. Program Kerja

Dalam melaksanakan audit operasional atas BPKB yang dinamakan dengan *audit self*, BPKB Custodian tidak membuat program kerja secara

tertulis, karena program kerja tertulis hanya akan menambah waktu pengauditan atas BPKB. Hal ini dilakukan BPKB Custodian, karena ini merupakan aktivitas yang biasa dilakukannya. BPKB Custodian hanya memprogramkan pelaksanaan auditnya di awal bulan tiap kali pengauditan BPKB, baik itu secara acak maupun secara keseluruhan. Hal ini bisa terlaksana, jika dihadiri oleh Operation Head ACC Cabang Padang. Jika Operation Head berhalangan untuk menyaksikan audit tersebut, maka BPKB Custodian akan menunda pelaksanaan audit operasional atas BPKB, kecuali Operation Head memberikan kuasa kepada perwakilannya untuk menyaksikan BPKB Custodian dalam melakukan audit atas BPKB tersebut.

Untuk Audit operasional secara acak, biasanya BPKB Custodian mengambil beberapa BPKB (sample) untuk diaudit. Tidak ada kriteria khusus yang ditetapkan untuk pemilihan BPKB yang akan diaudit. Biasanya jumlah BPKB yang dijadikan sample untuk diaudit tiap bulannya tidak sama. Sedangkan untuk audit secara keseluruhan, BPKB Custodian mengambil semua BPKB yang dijadikan jaminan kredit di ACC.

3. Tahap Audit Mendalam

Pada tahap audit ini, BPKB Custodian mencocokkan BPKB yang akan diaudit dengan hasil yang tercatat pada sistem berdasarkan nomor kontrak BPKB tersebut. Selanjutnya, BPKB Custodian mengumpulkan

semua dokumen yang berkaitan dengan BPKB yang diaudit. Dokumen tersebut terdiri dari:

- 1) Dokumen BPKB Masuk, yaitu dokumen yang dijadikan syarat untuk diterimanya BPKB sebagai jaminan kredit di ACC. Untuk kendaraan baru, dokumen yang dibutuhkan adalah faktur pembelian kendaraan, dan Aging SP BPKB. Sedangkan untuk kendaraan bekas dibutuhkan dokumen seperti: faktur pembelian, kwitansi Kosong, fotocopy KTP atas nama BPKB, fotocopy STNK, dan surat kontrak.
- 2) Dokumen BPKB Keluar, yaitu dokumen yang dijadikan syarat peminjaman BPKB untuk berbagai keperluan, bahkan untuk pengambilan BPKB yang sudah lunas pembayaran kreditnya. Dokumen yang dibutuhkan terdiri dari:
 - Untuk peminjaman BPKB, dibutuhkan BPKB lain sebagai jaminan beserta dokumen terkait (faktur, KTP Pemilik, kwitansi, cek fisik kendaraan, dan foto jaminan).
 - Untuk pengambilan BPKB yang sudah lunas pembayaran kreditnya, terdiri dari:
 - Pengambilan BPKB oleh pihak yang bersangkutan dibutuhkan KTP dan SIM
 - Pengambilan BPKB oleh pihak perwakilan dibutuhkan dokumen berupa surat kuasa pakai materai Rp. 6.000, KTP asli kedua pihak (pihak debitur dan pihak yang mewakili), dan surat pernyataan.

- Pengambilan BPKB oleh ahli waris dibutuhkan dokumen seperti: Surat kematian dari dokter, surat ahli waris, kartu keluarga, serta KTP ahli waris dan debitur
- Pengambilan BPKB atas nama perusahaan yang diwakilkan oleh pihak lain dibutuhkan dokumen tentang identitas perusahaan, fotocopy struktur organisasi, stempel perusahaan, surat kuasa, fotocopy KTP, serta surat pernyataan.

4. Tahap Temuan dan Rekomendasi

Setelah melewati tahap audit mendalam, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh BPKB Custodian adalah adalah tahap temuan dan rekomendasi. Pada tahap ini, BPKB Custodian memberikan hasil dari audit yang dilakukannya, seperti: ketidakcocokan antara BPKB yang ada di sistem dengan BPKB yang ada, atau tidak ditemukannya dokumen terkait yang berhubungan dengan BPKB masuk dan BPKB keluar.

Hal ini bisa terlihat dari laporan audit self selama 2 periode audit yang dilakukan secara acak oleh BPKB Custodian yang dihadiri oleh Operation Head, yaitu:

1) Pada tanggal 1 November 2011

Dalam laporan audit self ini terdapat 277 BPKB yang diaudit. Dari 277 BPKB yang diaudit terdapat temuan, yaitu:

- 2 buah BPKB yang tidak tercatat di dalam sistem

- 46 kwitansi BPKB tidak ditemukan
- 116 fotocopy KTP tidak ditemukan
- 1 Surat Keterangan juga tidak ditemukan

2) Pada tanggal 2 Januari 2012

Dalam laporan audit self ini terdapat 55 BPKB yang diaudit. Dari BPKB yang diaudit tersebut terdapat temuan sebagai berikut:

- 6 kwitansi BPKB tidak ditemukan
- 32 fotocopy KTP tidak ditemukan

Temuan di atas sangat penting untuk diselesaikan, karena itu merupakan syarat utama agar terjadinya prosedur In-Out BPKB. Jika syarat itu tidak terpenuhi, maka debitur tidak akan bisa menjadikan BPKB kendaraannya sebagai jaminan kredit di ACC. Temuan ini sangat bertentangan dengan pernyataan di atas, karena BPKB kendaraan debitur sudah menjadi jaminan kredit di ACC, sedangkan syarat yang telah ditetapkan ACC tidak ditemukan.

Setelah didapatkan beberapa temuan audit yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan, seperti yang terdapat dalam laporan audit tertanggal 1 November 2011 dan 2 Januari 2012, maka BPKB Custodian memberitahukan kepada operation head selaku pimpinan ACC cabang Padang. Setelah itu, Operation Head beserta BPKB Custodian mencari solusi terbaik, untuk BPKB yang tidak tercatat dalam sistem, sementara BPKB itu ada, maka BPKB Custodian menelusuri ketidakcocokan itu, sehingga didapat alasan ketidakcocokan tersebut karena nomor kontrak

yang belum dimasukkan kembali ke dalam sistem akibat adanya pengembalian BPKB oleh debitur ke ACC untuk keperluan bayar pajak. Sedangkan dokumen yang tidak lengkap, seperti kwitansi, fotocopy KTP, surat keterangan, dan lain-lain dicari keberadaannya, ini terjadi karena kesalahan dalam penyimpanannya. Jika tidak ditemukan, maka BPKB Custodian akan menghubungi debitur atau dealer untuk memastikan keberadaan dokumen tersebut.

5. Tahap Laporan Audit

Dari audit operasional yang dilaksanakan oleh BPKB Custodian berdasarkan cara yang ditentukan oleh pihak manajemen seperti yang tergambar di atas, maka BPKB Custodian memberikan hasil audit operasional dalam bentuk kolom kepada pimpinan. Kolom tersebut berisikan waktu pelaksanaan audit, pelaksana audit, pihak yang bertanggungjawab atas audit, data tentang BPKB, temuan audit yang harus ditindaklanjuti oleh pihak manajemen, agar dapat meminimalisir resiko kredit di masa yang akan datang.

Dari audit operasional yang dilakukan oleh BPKB Custodian, dapat dikatakan memadai karena tahap yang dilakukan sesuai dengan teori audit operasional yang telah ditetapkan oleh para ahli. Namun, perbedaan hanya terjadi pada laporan audit yang disiapkan oleh BPKB Custodian, karena laporan audit berbentuk kolom, hal ini dilakukan oleh BPKB Custodian agar lebih jelas dan efektif, karena laporan audit self yang dibutuhkan hanya untuk keperluan BPKB Custodian dalam mengevaluasi hasil kerjanya, dan untuk perusahaan, agar tetap dapat menjaga keamanan BPKB sebagai jaminan kredit di ACC.

4.5 Peranan Audit Operasional atas BPKB Sebagai Jaminan Kredit Dalam Meminimalisasi Piutang Tak Tertagih pada Astra Credit Companies (ACC) Cabang Padang

Dengan adanya unsur risiko piutang tak tertagih dan ketidakpastian nasabah dalam mengembalikan kredit yang telah diterimanya, maka diperlukan suatu pemeriksaan berkelanjutan atas kegiatan perkreditan untuk memperkecil risiko yang mungkin timbul, termasuk pemeriksaan secara berkala terhadap BPKB sebagai jaminan kredit satu-satunya pada ACC. ACC perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan jaminan kredit untuk memperkecil timbulnya piutang tak tertagih, sehingga tingkat kolektibilitas kredit dapat ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan menerapkan audit operasional yang memadai atas kegiatan perkreditan yang telah dijalankan.

Audit operasional atas BPKB yang dilakukan oleh ACC sudah dapat dikatakan baik, karena dibandingkan hasil temuan audit pada tanggal 1 November 2011 dengan hasil audit 2 Januari 2012, maka terdapat hasil sebagai berikut:

Tabel. Perbandingan Hasil Laporan Audit antara 2 Periode Audit

Ket	Tgl Audit	1 November 2011	2 Januari 2012
BPKB yang tidak tercatat di dalam sistem		2 Buah	Tidak ada
Kwitansi yang tidak ditemukan		16,61 %	10,91 %
Fotocopy KTP yang tidak ditemukan		41,88 %	58,18 %
Surat Keterangan yang tidak ditemukan		1 Lembar	Tidak Ada

Keterangan:

1) Kwitansi yang tidak ditemukan:

- Laporan audit acak tanggal 1 November 2011

$$\frac{46}{277} \times 100\% = 16,61 \%$$

- Laporan audit acak tanggal 2 Januari 2012

$$\frac{6}{55} \times 100\% = 10,91 \%$$

2) Fotocopy KTP yang tidak ditemukan

- Laporan audit acak tanggal 1 November 2011

$$\frac{116}{277} \times 100\% = 41,88 \%$$

- Laporan audit acak tanggal 2 Januari 2012

$$\frac{32}{55} \times 100\% = 58,18 \%$$

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan adanya perubahan kinerja menjadi lebih baik, terbukti dari sedikitnya jumlah temuan audit yang tidak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan ACC pada laporan audit self tanggal 2 Januari 2012 dibandingkan dengan temuan audit pada laporan audit self tanggal 1 November 2011.

Kinerja yang semakin baik tentang prosedur In-Out BPKB yang dilakukan oleh BPKB Custodian dari waktu ke waktu ini dapat membuat ACC bertahan di

dunia bisnis, karena ACC dapat menjaga jaminan kredit yang disyaratkannya kepada debitur beserta dokumen terkaitnya. Hal ini juga sangat berperan terhadap kelancaran penagihan piutang, karena prinsip-prinsip pemberian kredit yang dikemukakan oleh Kasmir (2010 : 109), menyatakan bahwa jaminan merupakan salah satu prinsip yang harus dipenuhi dalam pemberian kredit, karena fungsi dari jaminan adalah sebagai pelindung perusahaan perkreditan dari resiko kerugian yaitu berupa piutang tak tertagih.

Dengan adanya audit operasional terhadap BPKB, maka ACC dapat menjaga keamanan BPKB debitur, sehingga BPKB yang diterima merupakan jaminan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan perusahaan. Dengan adanya audit operasional terhadap BPKB, ACC akan merasa terlindungi, karena dapat memperkuat kegiatannya dalam menagih piutang, bahkan menarik kembali produk yang diberikannya pada debitur. Hal ini dapat dibuktikan oleh tim AR Management, dengan tugasnya untuk melakukan penagihan piutang apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh pelanggan. AR. Management dalam penagihan piutang pada pelanggan yang telat bayar, akan melakukan penagihan via telephon. Namun jika debitur menyatakan tidak mampu bayar kredit, maka AR. Management akan menarik kendaraan yang ada pada debitur dengan membawa jaminan kredit yaitu BPKB kendaraan yang bersangkutan untuk memperkuat proses penarikan kendaraan tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan didukung data yang diperoleh dari hasil penelitian terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Prosedur In-Out BPKB sebagai jaminan kredit pada Astra Credit Companies cabang Padang telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh para ahli. Hal ini terbukti dari pemenuhan syarat yang ditetapkan oleh perusahaan untuk debitur, jika debitur tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan, maka perusahaan tidak dapat melancarkan permohonan kredit yang diajukan debitur.
2. Kontrol yang baik telah dilaksanakan oleh ACC dalam mengamankan BPKB sebagai jaminan kredit satu-satunya. Hal ini terbukti dari tempat penyimpanan yang baik yang disediakan ACC dan alat pengaman yang dapat menjaga BPKB agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
3. Pelaksana audit atas BPKB pada Astra Credit Companies cabang Padang belum bisa dikatakan memenuhi persyaratan standar, karena auditor yang mengaudit BPKB merupakan karyawan yang melaksanakan prosedur *In-Out* atas BPKB itu sendiri. Oleh karena itu, ACC menyebut audit yang dilaksanakan dengan nama "audit self", yaitu tidak ada pemisahan tugas antara yang melaksanakan pekerjaan dengan yang melakukan audit atas pekerjaan tersebut.

4. Pelaksanaan audit operasional atas BPKB sebagai jaminan kredit telah dilaksanakan sesuai dengan tahap audit operasional yang ditetapkan para ahli, namun hal ini belum bisa dikatakan memadai karena:
 - Pelaksana audit tidak bisa dikatakan independen, karena tidak ada pemisahan tugas antara orang yang melaksanakan aktivitas dengan orang yang mengaudit aktivitas tersebut
5. Laporan audit operasional disampaikan kepada Operation Head selaku pimpinan cabang untuk dilakukan suatu perbaikan atas temuan audit yang menyimpang agar tidak mempengaruhi tujuan perusahaan yang hendak dicapai, yaitu menjadikan ACC sebagai perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia. Laporan audit yang dibuat sudah bisa dikatakan memadai, yaitu laporan audit self dalam bentuk kolom, hal ini dilakukan ACC, karena menurutnya lebih efektif dan efisien.
6. Walaupun audit operasional atas BPKB belum bisa dikatakan memadai, karena pelaksana audit yang belum bisa dikatakan independen, namun audit operasional yang dilakukan sudah bermanfaat dalam meminimalisasi piutang tak tertagih. Hal ini terbukti dari kekuatan AR. Management dalam menagih piutang kepada debiturnya dengan menjadikan BPKB sebagai kekuatan untuk menagih piutang, bahkan untuk menarik kendaraan yang ada pada debitur yang tidak mampu bayar kredit.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang peranan audit operasional dalam meminimalisasi piutang tak tertagih. Meskipun demikian, penelitian ini masih mengandung keterbatasan-keterbatasan antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan satu objek penelitian, sehingga pembahasan dan kesimpulan hanya pada satu tempat.
2. Penelitian ini fokus pada BPKB sebagai objek utama audit operasional perusahaan, karena BPKB merupakan jaminan kredit satu-satunya yang perlu dikontrol setiap saat.
3. Audit operasional yang diteliti dalam penelitian ini hanya menggunakan dua laporan audit, yaitu laporan audit operasional bentuk acak tertanggal 1 November 2011 dan 2 Januari 2012.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan serta beberapa kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini maka dapat diberikan saran dengan maksud untuk meningkatkan mutu penelitian selanjutnya. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya:

1. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah periode penelitian dengan menggunakan periode audit yang lebih panjang dan dokumen yang lebih banyak.

2. Penelitian selanjutnya hendaknya tidak hanya menggunakan jaminan kredit sebagai objek utama pelaksanaan audit operasional, tetapi juga menggunakan aspek-aspek yang lain, seperti watak, kemampuan, modal, serta prospek usaha calon debitur dalam pemberian kredit, sehingga hasil yang didapat nantinya dapat lebih mewakili prosedur dalam pemberian kredit terhadap debitur di ACC.
3. Untuk perusahaan tempat penelitian, diharapkan agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan untuk peningkatan pelaksanaan audit operasional atas BPKB, dengan cara menyediakan auditor internal yang khusus untuk melakukan audit operasional tersebut, agar independensi terhadap aktivitas audit tetap terjaga dengan baik, agar audit operasional yang dilaksanakan dapat lebih efektif dan memadai, sehingga tujuan perusahaan secara keseluruhan dapat tercapai.

**PERANAN AUDIT OPERASIONAL ATAS BPKB
SEBAGAI JAMINAN KREDIT
DALAM MEMINIMALISASI PIUTANG TAK TERTAGIH
PADA ASTRA CREDIT COMPANIES CABANG PADANG**

Padang, January 2012

Schubungan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: “Peranan Audit Operasional Atas BPKB Sebagai Jaminan Kredit Dalam Meminimalisasi Piutang Tak Tertagih Pada Astra Credit Companies Cabang Padang”, maka saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat meluangkan waktu agar bersedia memberikan data untuk penelitian ini.

Kerahasiaan identitas data Bapak/Ibu dari hasil penelitian ini dijamin hanya dipergunakan untuk kepentingan akademis serta merupakan sumbangan pemikiran bagi Astra Credit Companies Cabang Padang.

Terimakasih atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu dalam meluangkan waktunya untuk penelitian ini.

Hormat Saya,

Febry Yeni Anwar



DAFTAR PERTANYAAN UNTUK WAWANCARA
PADA ASTRA CREDIT COMPANIES CABANG PADANG

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah berdirinya Astra Credit Companies
2. Produk layanan Astra Credit Companies
3. Kepemilikan Saham Astra Credit Companies
4. Struktur Organisasi
5. Visi dan Misi Perusahaan

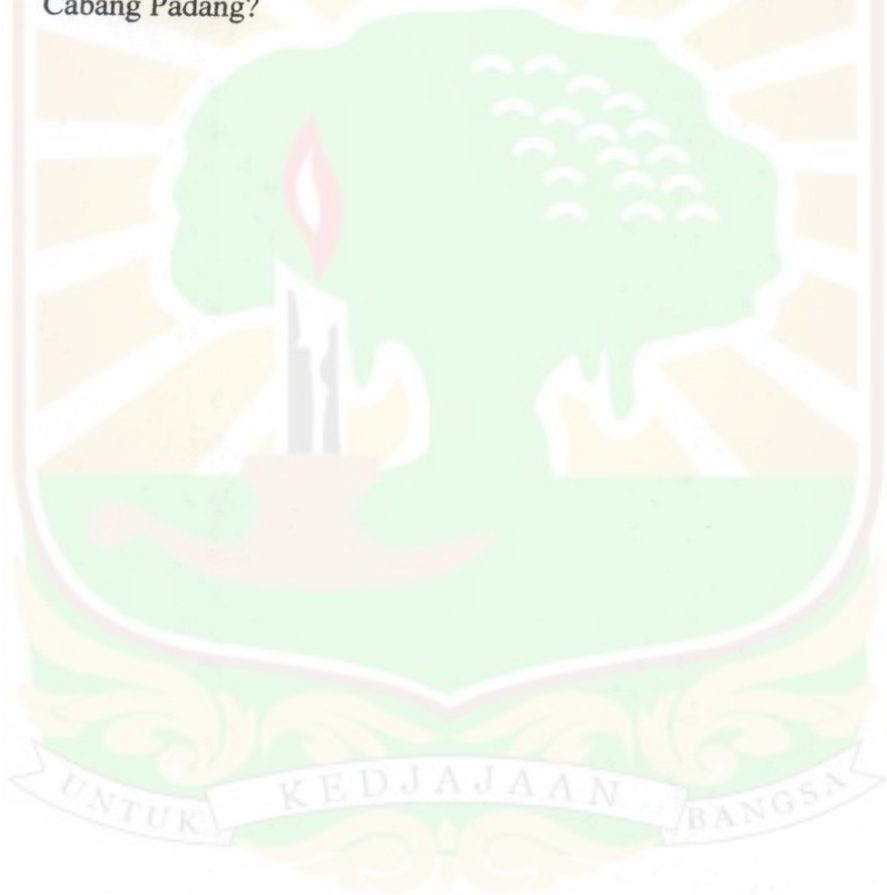
B. BPKB

1. Kenapa BPKB yang dijadikan jaminan satu-satunya pada Astra Credit Companies?
2. Bagaimana proses masuk dan keluar BPKB pada ACC Cabang Padang?
3. Apa yang menjadi kriteria masuk dan keluar BPKB pada ACC Cabang Padang?
4. Siapa yang bertanggungjawab atas BPKB yang dijadikan jaminan di ACC Cabang Padang?
5. Bagaimana fungsi substitusi atas tanggungjawab terhadap BPKB pada ACC Cabang Padang?
6. Bagaimana proses registrasi atas BPKB?
7. Bagaimana proses dan ruang penyimpanan BPKB pada ACC Cabang Padang?
8. Bagaimana proses pengamanan atas BPKB pada ACC Cabang Padang?
9. ACC Cabang Padang adalah kreditur untuk kendaraan baru dan bekas;
 - a. Jika status kendaraan baru, apa yang dijadikan jaminan untuk perjanjian kredit?
 - b. Jika status kendaraan bekas, bagaimana proses peminjaman BPKB untuk keperluan mutasi atau balik nama pemilik?

C. Audit Operasional

1. Kenapa perlu dilakukan audit operasional atas BPKB pada ACC Cabang Padang?
2. Kapan periode audit operasional atas BPKB dilakukan?
3. Siapa yang berwenang melakukan audit operasional atas BPKB?

4. Siapa yang berwenang mengawasi pekerjaan audit operasional di ACC Cabang Padang?
5. Bagaimana proses audit operasional atas BPKB?
6. Apa saja yang dibutuhkan dalam proses audit operasional atas BPKB?
7. Bagaimana bentuk hasil laporan audit operasional pada ACC Cabang Padang?
8. Apa saja temuan audit yang didapatkan setelah audit operasional dilaksanakan?
9. Apa bentuk rekomendasi yang diberikan manajemen terhadap temuan audit operasional tersebut?
10. Apakah audit operasional atas BPKB sebagai jaminan kredit dapat meminimalisasi piutang tak tertagih pada Astra Credit Companies Cabang Padang?



DAFTAR REFERENSI

- Agoes, Sukrisno. 2004. **Auditing oleh Kantor Akuntan Publik**. Lembaga Penerbit FE-UI. Jakarta : Salemba Empat.
- Arens, Alvin A. And James Klobbecke. 2000. **Auditing : an integrated Approach**. 8th edition. Prentice Hall International. Inc, upper saddle River. New Jarsey.
- Arens, Alvin A, dan Mark S. Beasley. 2003. **Auditing dan Pelayanan Verifikasi**. Jakarta : PT. Indeks.
- Artikel BEI. 2006. **Pembagian Audit Berdasarkan Pelaksana**.
- Astasari, Vonny. 2011. **Peranan Audit Operasional dalam Meningkatkan Efektivitas Kegiatan Perkreditan Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang**.
- Boynton, Johnson, Kell. 2003. **Modern Auditing**. Jilid I. Edisi ke-7. Jakarta: Erlangga.
- Dendawijaya, Lukman. 2001. **Manajemen Perbankan**. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Firdaus, H. Rachmat dan Maya Ariyanti. 2004. **Manajemen Perkreditan Bank Umum**. Bandung : Alfabeta
- Fitrianti, Annisa. 2006. **Manfaat Audit Operasional Dalam Menunjang Efektifitas Pengendalian Internal Penjualan Pada PT. INTI (Persero) Divisi JTS Bandung**.
- Fresetya, Rany. 2011. **Peranan Audit Operasional Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Biaya Operasi Pada Pt. PLN (Persero) Cabang Solok**.
- Kasmir. 2010. **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi. 2002. **Auditing Buku Satu Edisi Enam**. Jakarta : Salemba Empat.
- Reider, Rob. 2003. **Operational Review**. Third Edition. Singapore: John Willey and Sons. Inc
- Rosid, Abdul. 2011. **Piutang dan Pendapatan**. Pusat Pengembangan Bahan Ajar-UMD.

Satria, Budi. 2004. **Peranan Audit Operasional Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Fungsi Pemasaran Pada PT. Semen Padang,Tbk. Padang.**

Suryani, Ade Irma. 2005. **Peranan Audit Operasional Pengelolaan Piutang Dalam Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Departemen Kredit Pada PT. Suka Fajar, Ltd.**

Suyatno, Thomas. 2001. **Dasar-dasar Perkreditan.** Edisi ke 4. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Tugiman, Hiro. 2002. **Laporan Audit Sebaiknya Ditandatangani Auditor Bersertifikat.** Bandung.

Tunggal, Amin Widjaja. 2001.**Audit Manajemen Kontemporer.** Jakarta : Rineka Cipta.

Veithzal, Rivai. 2007. **Credit Management.**Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wahyu, Nurul. 2011. **Pelaksanaan Audit Operasional pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang.**

[Http://id.wikipedia.org/wiki/Buku_Pemilik_Kendaraan_Bermotor](http://id.wikipedia.org/wiki/Buku_Pemilik_Kendaraan_Bermotor)

